

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2022



## PENGADILAN AGAMA MAUMERE



Jalan Diponegoro, Wolomarang, Sikka  
Telp. (0382) 21134 Fax (0382) 23514  
e-mail : [pa.maumere@gmail.com](mailto:pa.maumere@gmail.com)

## KATA PENGANTAR



SURATNAH BAO, S.Ag.,M.H  
KETUA

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022 dapat kami susun dan kami sampaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Laporan tahunan ini bukanlah sekedar tradisi tahunan, akan tetapi adalah rekam jejak historis, terlebih merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Maumere kepada publik, yaitu melaksanakan program dan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Kabupaten Sikka selama kurun waktu Tahun 2022 .

Laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama Tahun 2022 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Demi peningkatan penyusunan Laporan Tahunan di tahun yang akan datang, segala saran konstruktif dari para pengguna laporan ini sangat kami harapkan.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.



Wassalam,  
Maumere, 03 Januari 2023

Ketua

SURATNAH BAO, S.Ag.,M.H  
NIP. 19740301 200604 2 001



**DAFTAR ISI**

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Kebijakan Umum Pengadilan Agama Maumere .....	10
B. Visi dan misi .....	11
C. Rencana Strategis (Renstra) .....	14
D. Reviu Indikator Kinerja Utama .....	15
<b>BAB II KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA .....</b>	<b>18</b>
<b>A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA.....</b>	<b>18</b>
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	20
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	21
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	22
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali .....	23
<b>B. PENYELESAIAN PERKARA .....</b>	<b>24</b>
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.....	24
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.....	26
3. Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK .....	27
4. Jumlah Perkara yang Berhasil Di Mediasi.....	27
<b>C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT         ISO PEGADILAN) .....</b>	<b>28</b>
1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).....	29
2. Sidang keliling .....	30
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	32
<b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Komposisi Sumber daya Manusia (SDM) berdasarkan kepangkatan         Golongan, dan Pendidikan.....</b>	<b>43</b>

1. Mutasi .....	44
2. Promosi .....	46
3. Pensiun.....	46
4. Diklat teknis dan Non Teknis .....	47
<b>BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI .....</b>	<b>48</b>
<b>A. Pengelolaan Keuangan .....</b>	<b>48</b>
1. Unit Organisasi (01) Badan Urusan Organisasi.....	50
2. Unit Organisasi (04) Dirjen Badilag.....	52
<b>B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....</b>	<b>53</b>
1. Matriks sarana dan prasarana gedung.....	55
2. Matriks Barang Milik Negara .....	57
3. Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana .....	58
4. Administrasi Tata Persuratan .....	59
<b>C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....</b>	<b>60</b>
1. Implementasi e-court .....	61
2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) .....	64
<b>BAB V PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA .....</b>	<b>65</b>
1. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	71
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	72
3. Inovasi Pelayanan Publik .....	78
<b>BAB VI PENGAWASAN .....</b>	<b>79</b>
1. Internal.....	83
2. Evaluasi .....	86
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Rekomendasi.....	90
<b>LAMPIRAN</b>	
1. SK TIM Penyusun Laporan tahunan Pengadilan Agama Maumere tahun 2022 .....	97
2. Foto-foto Kegiatan Pengadilan Agama Maumere tahun 2022 .....	121

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Kebijakan Umum Peradilan

Gambar. 1. Foto Gedung Kantor PA. Maumere



Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen

disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan PeradilanTata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya bab IX tentang kekuasaan kehakiman, sebagai respon terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan sebagai tindaklanjut dari penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dimasyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undangtersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan lahirlah Undang-undangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan **Peradilan Satu Atap**.

Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut untuk peradilan agama lahirilah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Gerakan pembaharuan peradilan selalu ditingkatkan dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya, segala inovasi dicanangkanguna memenuhi peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dimulai dengan ditetapkannya *Blue Print* (Cetak Biru) 2010-2035 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, Road Map Penerapan Cetak Biru, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Court*) dengan komponen pendaftaran (*E-Filing*), pembayaran (*E-Payment*), Pemanggilan (*E-Summon*), Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Layanan Sidang Keliling dan *E-Litigasi* serta audio pencegahan gratifikasi yang wajib setiap hari dibacakan, hal ini merupakan terobosan baru guna menyongsong Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya menuju era baru peradilan modern berbasis Teknologi Informasi (TI).

Bukan hanya Mahkamah Agung RI yang berupaya melakukan terobosan dan pembaharuan yang terus menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat pencari keadilan, Badan Peradilan Agama (Badilag) juga meluncurkan 13 (tiga belas) aplikasi unggulan guna mendukung secara maksimal program kerja Mahkamah Agung RI. Adapun 13 aplikasi yang dimaksud yaitu :

1. Aplikasi antrian sidang;
2. Aplikasi notifikasi perkara;
3. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan;
4. Aplikasi E-Register;
5. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan;

6. Aplikasi E-Kuangan;
7. Command Center;
8. Aplikasi PNBP Fungsional;
9. Aplikasi Validasi Akta Cerai;
10. Aplikasi Gugatan Mandiri.
11. E-Laporan
12. Vision
13. Aplikasi CCTV Online (*ACCO*).

Pengadilan Agama Maumere, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama (*Judex facti*) merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sejak saat itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu, Memeriksa, Memutus dan menyelesaikan setiap perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Merespon program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung maupun Dirjen Badilag berdasarkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Maumere, program-program tersebut diatas walaupun dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia, administrasi, finansial, Sarana dan prasarana tetapi Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan seluruh program tersebut baik Program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI maupun 13 (sebelas) aplikasi unggulan Dirjen Badan Peradilan Agama dengan prinsip pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), dan 5R (*Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin*) serta indah dan nyaman demi memenuhi kebutuhan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Walaupun dalam pelaksanaanya belum secara optimal karena masih terdapat kendala-kendaladalam implementasi aplikasi tersebut, seperti aplikasi PNBP *On-line* yang secara realitasnya masih terdapat beberapa konten dalam aplikasi tersebut belum lengkapsesuai kebutuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga kami sangat mengharapkan kepada tim pengembangan aplikasi pada instansi Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan Agama untuk segera membenahi kekurangan-kekurangan dalam optimalisasi aplikasi yang telah dirilis guna lebih memaksimalkan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu Pengadilan yang melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dulunya SAPM di Tahun 2018 dan telah mendapatkan nilai dengan predikat A “*Excellent*”, Pengadilan Agama Maumere juga pada Tanggal 10 Februari 2022 kembali mendapatkan predikat A “*Excellent*” berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 515/DjA/OT.00/2/2022 Tanggal 7 Februari 2022 perihal Hasil Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022, dengan ucapan rasa syukur yang tak terhingga karena Pengadilan Agama Maumere dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapai sebelumnya dengan predikat A “*Excellent*”, capaian ini tidak lain dari sebuah wujud komitmen dan kebersamaan dengan nilai-nilai kekeluargaan dari seluruh aparaturnya dalam mewujudkan implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Maumere, tak berhenti sampai disitu Pengadilan Agama Maumere di tahun 2022 juga mendapatkan



penghargaan Realisasi Anggaran dengan Kategori Baik, yang penghargaannya di berikan oleh KPPN Ende yang diserahkan tanggal 02 Oktober 2022;

**Gambar 2. Foto Piagam Penghargaan Kategori Baik**

Pengadilan Agama Maumere tak pernah surut dalam berbenah diri baik dalam hal peningkatan kualitas kinerja, memberikan pelayanan secara internal maupun dalam pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan,Sebagai tindaklanjut dari sebuah pembaharuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Maumere

berdasarkan kompetensi tugas dan wewenang juga telah melaksanakan dan mengimplementasikan 6 (enam) area perubahan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari :

1. Manajemen Perubahan (pola pikir dan budaya kerja)
2. Penataan Tata Laksana;
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Penguatan Pengawasan;
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pengadilan Agama Maumere berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Maumere berkedudukan di Kota Maumere dengan letak geografis antara 806'36"LS – 8048'0"LS dan 121040'12"BT – 122041'24"BT yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan wilayah hukum terdiri dari 21 Kecamatan dan 160 Kelurahan/Desa yang tersebar sebagaimana berikut :

Tabel 1. Daftar Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022

No	Nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa		Radius	Jarak (Km)
1	2		3	4
1	<b>Kecamatan Alok</b>			
	1	Kel. Kota Uneng	I	0 – 20 Km
	2	Kel. Nagalimang	I	0 – 20 Km
	3	Kel. Madawat	I	0 – 20 Km
	4	Kel. Kabor	I	0 – 20 Km
	5	Desa Pemana	Antar Pulau I	-
	6	Desa Gunung Sari	Antar Pulau I	-
	7	Desa Samparong	Antar Pulau IV	-
2	<b>Kecamatan Alok Timur</b>			
	1	Kel Waioti	I	0 – 20 Km
	2	Kel. Kota Baru	I	0 – 20 Km
	3	Kel. Beru	I	0 – 20 Km
	4	Kel. Wairotang	I	0 – 20 Km
	5	Kel. Nangameting	I	0 – 20 Km
	6	Desa Lepolima	Antar Pulau V	-

	7	Desa Watugong	II	-
	8	Desa Kojadoi	Antar PulauIII	-
	9	Desa Kojagete	Antar PulauIII	-
	10	Desa Parumaan	Antar PulauII	-
<b>3</b>	<b>Kecamatan Alok Barat</b>			
	1	Kel. Wuring	I	0 – 20 Km
	2	Kel. Hewuli	I	0 – 20 Km
	3	Kel. Wailiti	I	0 – 20 Km
	4	Kel. Wolomarang	I	0 – 20 Km
<b>4</b>	<b>Kecamatan Nita</b>			
	1	Desa Tilang	I	0 – 20 Km
	2	Desa Lusitada	I	0 – 20 Km
	3	Desa Bloro	I	0 – 20 Km
	4	Desa Tebuk	I	0 – 20 Km
	5	Desa Nita	I	0 – 20 Km
	6	Desa Takaplager	II	20 – 40 Km
	7	Desa Nitaloang	II	20 – 40 Km
	8	Desa Wuliwutik	II	20 – 40 Km
	9	Desa Ladogahar	II	20 – 40 Km
	10	Desa Riit	II	20 – 40 Km
	11	Desa Nirangkuling	II	20 – 40 Km
	12	Desa Maheboro	II	20 – 40 Km
<b>5</b>	<b>Kecamatan Lela</b>			
	1	Desa Kolidetung	II	20 – 40 Km
	2	Desa korowuwu	II	20 – 40 Km
	3	Desa Hepang	II	20 – 40 Km
	4	Desa Lela	II	20 – 40 Km
	5	Desa Watutedang	II	20 – 40 Km
	6	Desa Sikka	II	20 – 40 Km
	7	Desa Ligai	II	20 – 40 Km
	8	Desa Baopaat	II	20 – 40 Km
	9	Desa Du	II	20 – 40 Km
<b>6</b>	<b>Kecamatan Kewapante</b>			
	1	Desa Umagera	II	20 – 40 Km
	2	Desa Lantena	II	20 – 40 Km
	3	Desa Kopong	II	20 – 40 Km
	4	Desa Seusina	II	20 – 40 Km
	5	Desa Namangkewa	II	20 – 40 Km
	6	Desa Waiera	II	20 – 40 Km
	7	Desa Geliting	II	20 – 40 Km

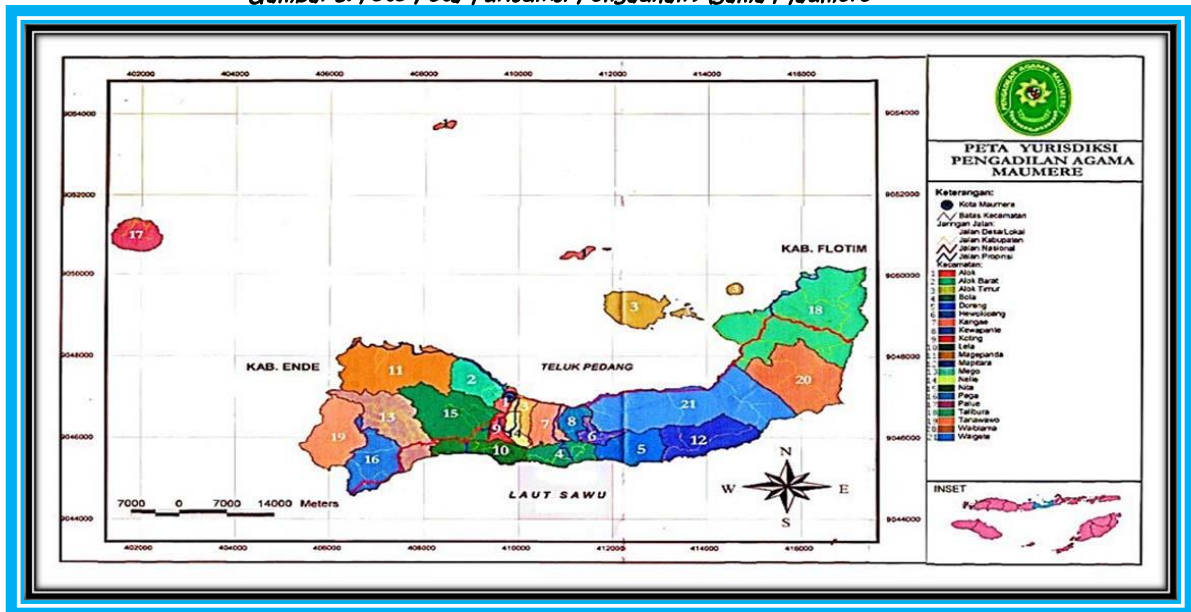
	8	Desa Wairkoja	II	20 – 40 Km
<b>7</b>	<b>Kecamatan Bola</b>			
	1	Desa Hokor	III	40 – 60 Km
	2	Desa Wolonwalu	III	40 – 60 Km
	3	Desa Wolokoli	III	40 – 60 Km
	4	Desa Bolo	III	40 – 60 Km
	5	Desa Umuta	III	40 – 60 Km
	6	Desa Ipir	III	40 – 60 Km
<b>8</b>	<b>Kecamatan Waigete</b>			
	1	Desa Pogon	II	20 – 40 Km
	2	Desa Aiburua	II	20 – 40 Km
	3	Desa Wairbleler	II	20 – 40 Km
	4	Desa Hoder	II	20 – 40 Km
	5	Desa Egon	II	20 – 40 Km
	6	Desa Nangatobong	II	20 – 40 Km
	7	Desa Waierterang	II	20 – 40 Km
	8	Desa Watudiran	II	20 – 40 Km
	9	Desa Rumut	II	20 – 40 Km
<b>9</b>	<b>Kecamatan Talibura</b>			
	1	Desa Talibura	Daerah SulitI	-
	2	Desa Darat Gunung	Daerah Sulit I	-
	3	Desa Darat Pantai	Daerah Sulit I	-
	4	Desa Nebe	Daerah Sulit I	-
	5	Desa Hikong	Daerah SulitI	-
	6	Desa Kringa	Daerah Sulit I	-
	7	Desa Ojang	Daerah Sulit I	-
	8	Desa Wailamung	Daerah Sulit I	-
	9	Desa Lewomodo	Daerah SulitI	-
	10	Desa Timutawa	Daerah Sulit I	-
	11	Desa Bangko'or	Daerah Sulit I	-
	12	Desa Nangahale	Daerah SulitI	-
<b>10</b>	<b>Kecamatan Nele</b>			
	1	Desa Nelle Wutung	I	0 – 20 Km
	2	Desa Nelle Lorang	I	0 – 20 Km
	3	Desa Manuburu	I	0 – 20 Km
	4	Desa Nelee Barat	I	0 – 20 Km
	5	Desa Nelle Urung	I	0 – 20 Km
<b>11</b>	<b>Kecamatan Magepanda</b>			
	1	Desa Kolisia A	II	20 – 40 Km
	2	Desa Magepanda	II	20 – 40 Km

	3	Desa Reroroja	II	20 – 40 Km
	4	Desa Kolisia B	II	20 – 40 Km
	5	Desa Done	II	20 – 40 Km
<b>12</b>	<b>Kecamatan Koting</b>			
	1	Desa Koting A	I	0 – 20 Km
	2	Desa Koting B	I	0 – 20 Km
	3	Desa Koting C	I	0 – 20 Km
	4	Desa Koting D	I	0 – 20 Km
	5	Desa Paubekor	I	0 – 20 Km
	6	Desa Ribang	I	0 – 20 Km
<b>13</b>	<b>Kecamatan Hewokloang</b>			
	1	Desa Hewopkloang	II	20 – 40 Km
	2	Desa Hewopuat	II	20 – 40 Km
	3	Desa Wolompa	II	20 – 40 Km
	4	Desa Rubit	II	20 – 40 Km
	5	Desa Baomekot	II	20 – 40 Km
	6	Desa Munerana	II	20 – 40 Km
	7	Desa Kajowair	II	20 – 40 Km
<b>14</b>	<b>Kecamatan Kangae</b>			
	1	Desa Teka iku	II	20 – 40 Km
	2	Desa Mekendetung	Daerah SulitI	
	3	Desa Blatation	II	20 – 40 Km
	4	Desa Kokowahor	II	20 – 40 Km
	5	Desa Watumilok	II	20 – 40 Km
	6	Desa Tanaduen	II	20 – 40 Km
	7	Desa Watuliwung	II	20 – 40 Km
	8	Desa Habi	II	20 – 40 Km
	9	Desa Langir	II	20 – 40 Km
<b>15</b>	<b>Kecamatan Doreng</b>			
	1	Desa Wolomotong	III	40 – 60 Km
	2	Desa Kloangpopot	III	40 – 60 Km
	3	Desa Wogalirit	III	40 – 60 Km
	4	Desa Waihawa	III	40 – 60 Km
	5	Desa Nenbura	III	40 – 60 Km
	6	Desa Wolonterang	III	40 – 60 Km
	7	Desa waturerak	III	40 – 60 Km
<b>16</b>	<b>Kecamatan Mapitara</b>			
	1	Desa Natakoli	III	40 – 60 Km
	2	Desa Hebing	III	40 – 60 Km
	3	Desa Hale	III	40 – 60 Km

	4	Desa Egongahar	III	40 – 60 Km
<b>17</b>	<b>Kecamatan Waiblama</b>			
	1	Desa Natarmage	III	40 – 60 Km
	2	Desa Pruda	III	40 – 60 Km
	3	Desa Werang	Daerah Sulit I	-
	4	Desa Tanarawa	Daerah SulitI	-
	5	Desa Linmedo	Daerah Sulit I	-
	6	Desa Tua Bao	Daerah SulitI	-
<b>18</b>	<b>Kecamatan Paga</b>			
	1	Desa Wolowiro	Daerah SulitI	-
	2	Desa Maulo'o	Daerah SulitI	-
	3	Desa Mbegu	Daerah SulitI	-
	4	Desa Paga	III	40 – 60 Km
	5	Desa Lenanderata	Daerah SulitI	-
	6	Desa Masebewa	Daerah SulitI	-
	7	Desa Wolorega	Daerah SulitI	-
	8	Desa Wolowena	Daerah SulitI	-
<b>19</b>	<b>Kecamatan Mego</b>			
	1	Desa Korobhera	Daerah SulitII	-
	2	Desa Dobo	Daerah SulitII	-
	3	Desa Bhera	Daerah SulitII	-
	4	Desa Wolodhesa	Daerah SulitII	-
	5	Desa Gera	Daerah SulitII	-
	6	Desa Liakutu	Daerah SulitII	-
	7	Desa Parabubu	Daerah SulitII	-
	8	Desa Dobo Nua Pu'a	Daerah SulitII	-
	9	Desa Kowi	Daerah SulitII	-
	10	Desa Napugera	Daerah SulitII	-
<b>20</b>	<b>Kecamatan Tanawawo</b>			
	1	Desa Bu Selatan	Daerah SulitII	-
	2	Desa Detubinga	Daerah SulitII	-
	3	Desa Bu Utara	Daerah SulitII	-
	4	Desa Bu Watuweti	Daerah SulitII	-
	5	Desa Loke	Daerah SulitII	-
	6	Desa Renggarasi	Daerah SulitII	-
	7	Desa Poma	Daerah SulitII	-
	8	Desa Tuwa	Daerah SulitII	-
<b>21</b>	<b>Kecamatan Palue</b>			
	1	Desa Maluriwu	Antar PulauV	-
	2	Desa Rokirolet	Antar Pulau V	-

3	Desa Tuanggeo	Antar Pulau V	-
4	Desa Ladolaka	Antar Pulau V	-
5	Desa Nitunglea	Antar Pulau V	-
6	Desa Reruwairere	Antar Pulau V	-
7	Desa Kesokoja	Antar Pulau V	-
8	Desa Lidi	Antar Pulau V	-

Gambar 3. Foto Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere



Sebagai daerah yang berada di Kepulauan Flores dituntut untuk lebih memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan terhadap para pencari keadilan, serta untuk memenuhi tuntutan keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) oleh Pengadilan Agama Maumere sebagai bagian mewujudkan peningkatan transparansi pengadilan sebagaimana amanah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sudah dilakukandengan menyediakan media *Website* : [www.pa-maumere.go.id](http://www.pa-maumere.go.id). yang dapat di akses oleh masyarakat pencari keadilan secara umum, serta media Teknologi Informasi (TI) pendukung lainnya khusus internal aparatur Pengadilan Agama Maumere yaitu aplikasi Pengelolaan Data dan Pengusulan Pegawai dengan Sistim Informasi Kepegawaian (SIKEP) MARI dan *Aplikasi Backup Sikep* (ABS) Badilag MARI, Aplikasi SIMTEPA, Aplikasi Komdanas (Biaya Perkara, Kepegawaian

dan Keuangan), Aplikasi PNBP SIMARI, E-Biling Simponi, Movev Bappenas, SAKPA, SILABI, dan email :pa.maumere@gmail.com.

## **B. Visi dan Misi**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas, Pengadilan Agama Maumere telah menyusun program kerja sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Maumere dalam pencapaian Visi dan Misi serta tujuan organisasi.

### *Visi*

Visi Pengadilan Agama Maumere mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yaitu **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMAMAUMERE YANG AGUNG”**.

### *Misi*

Sedangkan untuk mencapai Visi tersebut Pengadilan Agama maumere menetapkan Misi sebagai berikut:

1. **Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maumere;**
2. **Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan;**
3. **Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Agama Maumere;**
4. **Meningkatkan pengawasan dan transparansi di Pengadilan Agama Maumere.**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Maumere tersebut, perlu membuat Motto sebagai identitas dan suplemen penyemangat kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere, adapun Motto Pengadilan agama maumere adalah **“CERDAS”**(*Cakap, Efektif dan Efisien, Ramah, Dinamis, Akuntabel, Sinergis*).

Motto dan Visi Misi juga rutin dibaca bersama setiap apel pagi pada hari senin.

## **C. Rencana Strategis (Renstra)**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, Pengadilan Agama Maumere mengambil langkah-langkah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA).

Dengan rencana strategis ini maka implementasi target, output dan out come yang diinginkan tercapai. Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere telah dibuat sejak tahun 2015, terakhir disusun Rencana Strategis 2020-2024 yang sudah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kerja untuk Tahun 2020 hingga Tahun 2024.

Adapun Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere tahun 2020-2024 tersebut sebagai berikut :

**Visi** : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;

**Misi** :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Maumere
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang prima dan berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Profesionalitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Agama Maumere
4. Meningkatkan pengawasan dan Transparansi di Pengadilan Agama Maumere

Tabel. 2. Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun) %	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	<b>Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>	Presentase sisa perkara yang diselesaikan*	100%	100%**	-	-	-
2		Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			Presentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
3		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	95%	100%	100%	100%
4		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	98%	100%	100%	100%
5		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali			Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	95%	98%	100%	100%	100%
6		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan			Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan	80%	85%	90%	93%	95%

		peradilan			peradilan					
7	<b>Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>	Presentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	<b>Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>	Presentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
8		Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi			Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	10%	20%	50%	60%
9		Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.			Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu*	100%	100%**	-	-	-
10		Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus			Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus*	100%	100%**	-	-	-
11	<b>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat dan miskin</b>	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	<b>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat dan miskin</b>	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
12		Presentase perkara yang			Presentase perkara yang	100%	100%	100%	100%	100%

	<i>terpinggirkan</i>	diselesaikan diluar gedung pengadilan		<i>terpinggirkan</i>	diselesaikan diluar gedung pengadilan					
13		Presentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum			Presentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
14		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)			Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
15	<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%
16	<b>Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien</b>	Prosentase kelengkapan dan tertib dalam administrasi dan manajemen peradilan	100%	<b>Terlaksananya administrasi kesekretariatan yang tertata dan lengkap</b>	Presentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pembuatan KGB	100%	100%	100%	100%	100%
17					Presentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%
18					Presentase ketepatan pelayanan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%

					dalam pembuatan surat cuti pegawai					
19					Presentase ketepatan penyusunan laporan keuangan yang dibuat	100%	100%	100%	100%	100%
20					Presentase ketepatan penyusunan Laporan BMN yang dibuat	100%	100%	100%	100%	100%
21					Presentase ketepatan penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	100%	100%	100%	100%	100%
22					Presentase ketepatan pengiriman laporan absensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
23					Presentase penyusunan Rencana Anggaran/ RKA-KL	100%	100%	100%	100%	100%
24					Presentase Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%
25	<b><i>Terciptanya kualitas sumber daya aparatur</i></b>	Presentase sumber daya aparatur pengadilan agama yang	100%	<b><i>Peningkatan kualitas sumber daya manusia</i></b>	Presentase pegawai yang disulkan tenaga teknis	10%	15%	20%	25%	25%

26	<i>peradilan yang lebih profesional dan proporsional</i>	berkompeten		(SDM)	Presentase pegawai yang diusulkan diklat non teknis	10%	15%	20%	20%	25%
27					Presentase pegawai yang mengikuti/ lulus diklat non teknis	10%	15%	20%	25%	25%

\*Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 per tanggal 16 Juni 2021, indikator kinerja tersebut telah dihapus.

\*\* Target indikator kinerja disusun mulai bulan Januari – Juni 2022, sebelum Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 per tanggal 16 Juni 2021 diberlakukan

#### D. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Maumere telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 berdasarkan SK.Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor :W23-A9/ 112 /KP.00.3/1/SK/1/2021 tanggal 02 Januari 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

NO	TUJUAN		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara tahunlalu dibagi jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang ada dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	Sisa perkara tahun lalu dibagi sisa perkara tahun sebelumnya dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <input type="checkbox"/> Banding <input type="checkbox"/> Kasasi <input type="checkbox"/> PK	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan perkara dikali seratur persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Indeks kepuasan pencari keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dibagi jumlah	Panitera	Laporan Bulanan dan

	n penyelesaian perkara	pihak tepat waktu	perkara yang dilakukan mediasi dikali seratus persen		Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dibagi jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website dibagi jumlah putusan perkara dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo dikali seratus persen	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dibagi jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan dikali seratus persen	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan	Jumlah perkara volunter identitas hukum yang	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan

		( <i>Voluntair</i> ) identitas hukum.	diselesaikan dibagi Jumlah perkara Volunter identitas hukum yang diajukan dikali seratus persen		Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dibagi jumlah pencari keadilan golongan tertentu dikali seratus persen	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
4	Meningkatnya Kepautahan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi).	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dibagi jumlah putusan perkara yang sudah BHT dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

## BAB II

## KEADAAN PERKARA

**A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama****1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

Keadaan perkara adalah suatu laporan tentang keadaan perkara pada Pengadilan Agama Maumere yang diuraikan dengan meliputi sisa perkara tahun lalu, perkara yang masuk pada tahun berjalan yang dilengkapi dengan Jenis perkara, perkara yang putus ditahun berjalan, sisa perkara tahun berjalan, Pengelolaan Biaya Proses dan Keadaan Keuangan Perkarayang penyajiannya digambarkan baik dalam suatu narasi, statistik, maupun grafik.

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Kondisi Perkara pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2022 :

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| a. Sisa perkara tahun 2021         | : 0 Perkara   |
| b. Perkara masuk tahun 2022        | : 144 Perkara |
| c. Perkara yang diputus tahun 2022 | : 140 Perkara |

**Dengan rincian sebagai berikut :**

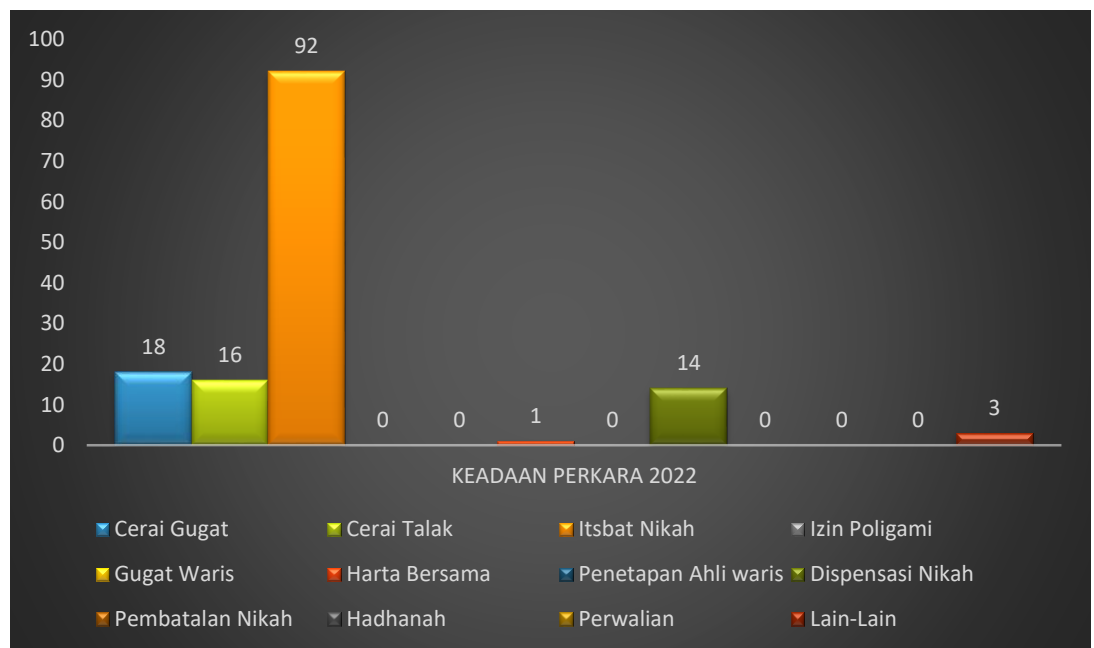
- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| • Perkara yang dicabut        | : 15 Perkara |
| • Perkara yang dikabulkan     | : 97 Perkara |
| • Perkara yang ditolak        | : 7 Perkara  |
| • Perkara yang tidak diterima | : 0 Perkara  |
| • Perkara yang di gugurkan    | : 19 Perkara |
| • Perkara yang dicoret        | : 0 Perkara  |
| • Perkara perdamaian          | : 2 Perkara  |

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2022, berjumlah 144 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . 4. Jenis dan Jumlah Perkara PA. Maumere Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	18	Perkara
2.	Cerai Talak	16	Perkara
3.	Itsbat Nikah	92	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	1	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	14	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
12.	Lain-Lain	3	Perkara
<b>JUMLAH</b>		<b>144</b>	<b>Perkara</b>

Grafik. 1. Jenis dan Jumlah perkara yang diterima PA. Maumere



d. Sisa Perkara tahun 2022 sebanyak 4 Perkara

Adapun rincian sisa perkara Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel . 5. Jenis dan Jumlah Sisa Perkara PA. Maumere Tahun 2022

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Keterangan
1	26/Pdt.G/2022/PA.Mur	Cerai Gugat	1
2	27/Pdt.G/2022/PA.Mur	Cerai Talak	1
3	30/Pdt.G/2022/PA.Mur	Cerai Talak	1
4	36/Pdt.G/2022/PA.Mur	Cerai Talak	1
Jumlah Perkara			4 Perkara

Keempat perkara tersebut merupakan perkara cerai dengan kategori *ghaib* (alamat atau kediaman tergugat dan termohon tidak diketahui dengan jelas) yang didaftarkan oleh para pihak pada periode Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2022. Perkara 26/Pdt.G/2022/PA.Mur didaftarkan pada tanggal 14 September 2022, perkara 27/Pdt.G/2022/PA.Mur pada 15 September 2022, perkara 30/Pdt.G/2022/PA.Mur didaftarkan pada 3 Oktober 2022 dan perkara 36/Pdt.G/2022/PA.Mur pada 14 Desember 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami bahwa sidang pertama perkara cerai kategori *ghoib* dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah didaftarkan. Hal ini karena pada perkara *ghoib*, panggilan kepada tergugat disampaikan dengan menempelkan surat gugatan pada papan pengumuman dan mengumumkan pada *mass media* sebanyak 2 kali, dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama adalah selama 1 bulan. Selanjutnya, jarak waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan diatur skurang-kurangnya adalah 3 bulan.

Dengan demikian, oleh karena empat perkara *in casu* didaftarkan pada akhir tahun 2022, maka persidangan terhadap perkara tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang.

e. Keadaan Keuangan Perkara Sisa Tahun 2022

Berdasarkan keadaan keuangan perkara dengan data dukung pada Aplikasi SIPP serta Aplikasi E-Kuangan Perkara, keadaan sisa keuangan perkara sampai pada tanggal 31 Desember 2022 dapat dilihat dalam rincian berikut :

**Tabel . 6. Sisa uang Perkara PA. Maumere Tahun 2022**

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Jumlah Sisa
1	26/Pdt.G/2022/PA.Mur	Cerai Gugat	230.000
2	27/Pdt.G/2022/PA.Mur	Cerai Talak	325.000
3	30/Pdt.G/2022/PA.Mur	Cerai Talak	325.000
4	36/Pdt.G/2022/PA.Mur	Cerai Talak	325.000
<b>Jumlah Sisa Keuangan Perkara</b>			<b>1.205.000</b>

f. Pengelolaan Biaya Proses

Pengelolaan biaya proses Tahun 2022 berdasarkan jumlah penerimaan perkara dan data base Komdanas biaya perkara dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel . 7. Penerimaan dan pengeluaran Biaya proses PA. Maumere Tahun 2022**

No	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
1	Januari	4.710.000	2.690.500	2.339.500
2	Februari	4.475.000	3.897.000	2.917.000
3	Maret	762.000	2.959.000	720.000
4	April	700.000	1.420.000	0
5	Mei	5.659.000	3.256.000	2.403.000
6	Juni	8.345.000	10.478.000	270.000
7	Juli	2.701.000	1.686.000	1.285.000
8	Agustus	3.460.000	4.130.000	615.000
9	September	3.144.000	2.048.000	1.711.000
10	Oktober	3.815.000	2.623.000	2.903.000
11	November	4.384.000	5.078.000	2.209.000
12	Desember	825.000	1.829.000	1.205.000

## 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Keadaan perkara tingkat banding merupakan keadaan perkara di Pengadilan Agama Maumere yang melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang;

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere yang mengajukan banding pada Tahun 2022 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- a. Sisa perkara banding tahun 2021 : 0 Perkara
- b. Perkara banding masuk tahun 2022 : 0 Perkara
- c. Perkara banding yang diputus tahun 2022 : 0 Perkara
- d. Sisa perkara banding tahun 2022 : 0 Perkara

Tabel . 8. Jenis dan Jumlah Perkara Banding PA. Maumere

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	0	Perkara
2.	Cerai Talak	0	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
	JUMLAH	0	Perkara

## 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Keadaan perkara tingkat kasasi merupakan keadaan perkara di Pengadilan Agama Maumere yang melakukan upaya Kasasi di Mahkamah Agung;

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere yang Mengajukan Kasasi pada Tahun 2022 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- a. Sisa perkara kasasi tahun 2021 : 0 Perkara
- b. Perkara kasasi masuk tahun 2022 : 0 Perkara
- c. Perkara kasasi yang diputus tahun 2022 : 0 Perkara
- d. Sisa perkara banding tahun 2022 : 0 Perkara

**Tabel . 9. Jenis dan Jumlah Perkara Kasasi PA. Maumere**

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	0	Perkara
2.	Cerai Talak	0	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>Perkara</b>

#### **4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)**

Keadaan perkara tingkat Peninjauan Kembali (PK) merupakan keadaan perkara di Pengadilan Agama Maumere yang melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung yang dengan adanya bukti-bukti baru yang diajukan yang memenuhi legal Standing pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK).

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere yang Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Tahun 2022 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- a. Sisa perkara PK tahun 2021 : 0 Perkara

- b. Perkara PK masuk tahun 2022 : 0 Perkara  
 c. Perkara PK yang diputus tahun 2022 : 0 Perkara  
 d. Sisa Perkara PK tahun 2022 : 0 Perkara

Tabel .10. Jenis dan Jumlah Perkara Kasasi PA. Maumere

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	0	Perkara
2.	Cerai Talak	0	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>Perkara</b>

## B. Penyelesaian Perkara

Keadaan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Maumere untuk tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2021. Adapun untuk tahun 2019 jumlah perkara yang diterima adalah 55, pada tahun 2020 jumlah perkara yang diterima adalah 61, tahun 2021 jumlah perkara yang diterima adalah 97, sedangkan pada tahun 2022 perkara yang diterima adalah 144 perkara. Berikut kami tampilkan grafik perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere dari tahun 2019 sampai dengan 2022:

Grafik 2 . Penerimaan Perkara PA. Maumere 3 Tahun terakhir



### 1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Kondisi jumlah sisa perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2022 :

- Sisa perkara tahun 2021 : 0 Perkara
- Sisa Perkara yang belum diputus tahun 2022 : 4 Perkara

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel . 11. Jenis dan Jumlah Sisa perkara yang diputus Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	1	Perkara
2.	Cerai Talak	3	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
	<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>Perkara</b>

## 2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Batas waktu penyelesaian perkara pada tingkat pertama mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan. Pada Tahun 2022 Pengadilan Agama Maumere telah memutus perkara sebanyak 140 perkara. Adapun jumlah perkara keseluruhan yang diterima tahun 2022 sebanyak 144 Perkara.

**Tabel . 12. Jenis Perkara dan Waktu Putus Perkara Tahun 2022**

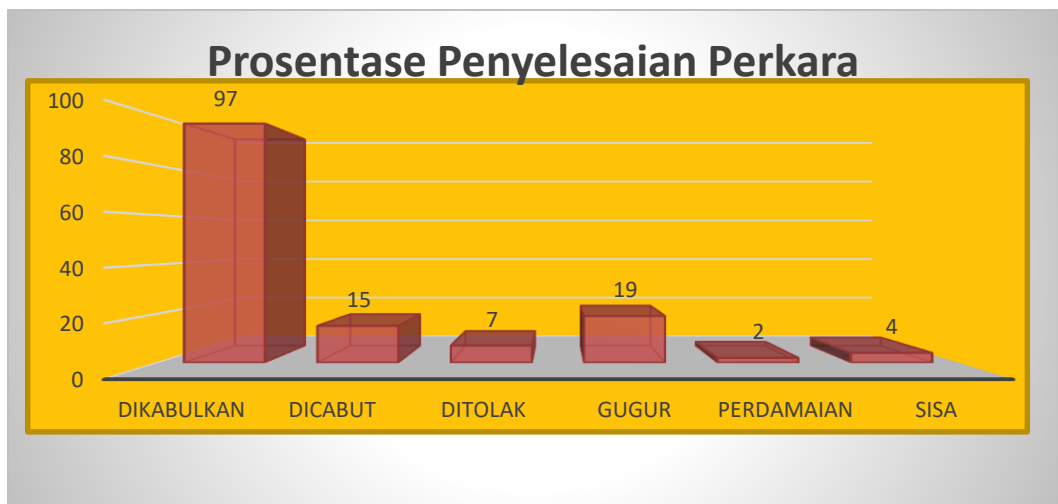
No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara berdasar Waktu Putus					
		1 bulan	2 bulan	3 bulan	4 bulan	>5 bulan	Jumlah Perkara
1.	Cerai Gugat	16	0	0	1	0	17
2.	Cerai Talak	10	3	0	0	0	13
3.	Itsbat Nikah	93	0	0	0	0	93
4.	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
5.	Gugat Waris	0	0	0	0	0	0
6.	Harta Bersama	0	1	0	0	0	1
7.	Penetapan Ahli Waris	0	0	0	0	0	0
8.	Dispensasi Nikah	14	0	0	0	0	14
9.	Pembatalan Nikah	0	0	0	0	0	0
10.	Hadhanah	0	0	0	0	0	0
11.	Perwalian	0	0	0	0	0	0
12.	Lain-Lain (Perbaikan Penetapan)	2	0	0	0	0	2
Jumlah Total							<b>140</b>

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2022 dalam prosentase adalah seperti tabel berikut ini :

Tabel . 13. Prosentase penyelesaian Perkara PA. Maumere

DITERIMA			PUTUS	DICABUT	DITOLAK	DICORET	GUGUR	Tidak Dapat Diterima	Perdamai an	SISA 2022	PROSENTASE PENYELESAIAN
SISA 2021	TH. 2022	JUMLAH									
0	144	144	140	15	7	0	19	0	2	4	97,22 %

Grafik 3. Prosentase penyelesaian Perkara PA. Maumere



Jumlah perkara Gugatan yang putus selama Tahun 2022 adalah 34 perkara. Adapun Penyebab terjadinya perceraian tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Zina : - Perkara
- b. Mabuk : - Perkara
- c. Madat : - Perkara
- d. Judi : - Perkara
- e. Meninggalkan Salah Satu Pihak : 2 Perkara
- f. Dihukum Penjara : - Perkara
- g. Poligami : - Perkara
- h. KDRT : 1 Perkara
- i. Cacat Badan : - Perkara
- j. Perselisihan Terus Menerus : 25 Perkara
- k. Kawin Paksa : - Perkara
- l. Murtad : 1 Perkara

m. Ekonomi	:	- Perkara
n. ditolak	:	1 Perkara
o. Gugur	:	1 Perkara
p. Dicabut	:	3 Perkara
<b>Jumlah</b>	:	<b>34 Perkara</b>

Selanjutnya jumlah perkara Permohonan yang diputus selama Tahun 2022 adalah 108 perkara, adapun secara ringkas jenis-jenis perkara permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Dispensasi Kawin	:	12 Perkara
b. Isbat Nikah	:	94 Perkara
c. Lain-Lain	:	2 Perkara

### 3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

Perkara Pada Pengadilan Agama Maumere yang putus sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 140 Perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 14. Perkara yang tidak mengajukan upaya Banding, Kasasi, PK, PA. Maumere

No	Jenis Perkara Putus	Jumlah	
1	Kabul	97	Perkara
2	Gugur	19	Perkara
3	Tidak Dapat Diterima	7	Perkara
4	Cabut	15	Perkara
5.	Perdamaian	2	Perkara
<b>Jumlah Perkara</b>		<b>140</b>	<b>Perkara</b>

Dari seluruh perkara yang telah diputus tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK. Dengan kata lain semua perkara pada Pengadilan Agama Maumere sampai dengan Desember 2022 tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun PK.

### 4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Maumere menyelesaikan perkara melalui mediasi sebanyak 13 perkara. Dari 13 perkara tersebut 1 perkara

diantaranya berhasil dengan akta perdamaian, 8 perkara dinyatakan berhasil sebagian serta 3 perkara dinyatakan berhasil dengan pencabutan. Adapun 1 perkara dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dari 13 perkara mediasi yang dilaksanakan, 12 perkara mediasi diantaranya dinyatakan berhasil.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dihitung presentase perkara yang **berhasil** diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar **92,3 %** dibandingkan dengan jumlah perkara mediasi selama tahun 2022 secara keseluruhan.

Salah satu perkara mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian adalah perkara 9/Pdt.G/2022/PA.Mur tentang Gugatan Harta Bersama. Dalam perkara yang di mediasi oleh Hakim Mediator, YM. Ahmad Muliadi, S.Sy tersebut, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka dengan membagi Harta Bersama diantara Penggugat dan Tergugat secara proporsional yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Perdamaian.

Adapun secara rinci mediasi pada Pengadilan Agama Maumere untuk tahun 2022 dapat dilihat dalam rincian tabel berikut :

Tabel . 15. Hasil Mediasi Perkara PA. Maumere

No	Hasil Mediasi	Jumlah	
1	Berhasil Dengan Akta Perdamaian	1	Perkara
	Berhasil Sebagian	8	Perkara
	Berhasil Dengan Pencabutan	3	Perkara
2	Tidak Berhasil	1	Perkara
5	Tidak dapat dilaksanakan	0	Perkara
<b>Jumlah Perkara</b>		<b>13</b>	<b>Perkara</b>

### C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Pengadilan Agama Maumere adalah salah satu satuan kerja tingkat pertama yang telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Akreditasi ini pada jaman dahulu disebut sebagai SAPM.

Pada tahun 2022 berdasarkan Surat dari Ditjen Badilag Nomor 4095/DjA.3/HM.00/9/2022 tentang Perubahan Kegiatan Asesmen APM tahun

2022 dijelaskan bahwa pelaksanaan Asessmen Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022 melalui telusur dokumen dan observasi implementasi tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pada tahun 2022 Ditjen Badilag tidak melaksanakan *Surveillance Eksternal*. Namun demikian, segenap Aparatur Pengadilan Agama Maumere telah menyiapkan dengan sebaik mungkin komponen-komponen untuk mendukung pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu. Selain itu, Pengadilan Agama Maumere juga telah menyelesaikan dan mengunggah *eviden-eviden* APM dalam situs <https://pmpapmzi.badilag.net/apm/>. juga telah dilaksanakan *Surveillance Internal* yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan total nilai sebesar 897,5 (dari skala 1000). Adapun pembahasan lebih lanjut terkait Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) akan dijabarkan pada **Bab V** tentang **Peningkatan Pelayanan Publik**.

#### **D. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) atau Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum**

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Maumere yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT Cabang Maumere, sebagaimana yang tertuang dalam *Memorandum Of Understanding (MOU)* Nomor : W23-A9/168/OT.01.3/1/2022 tanggal 12 Januari 2022 dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu (*Justice For All*), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dengan pembiayaan oleh Negara.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Maumere mendapatkan alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Jasa Layanan Bantuan Hukum sebesar Rp. 30.000.000,- dan telah merealisasikan pelaksanaan Pos Layanan Hukum /Posbakum dengan jumlah pihak yang mendapatkan layanan sejumlah jam pelayanan sebanyak 360 jam layanan dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,-

(Dua puluh empat juta rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 0 (Nihil). Dalam hal ini capaian pelaksanaan realisasi Pos Layanan Hukum/Posbakum sebesar 100%..

Adapun realisasi jumlah pihak dan jam pelayanan selama tahun 2022 akan dijabarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 26 Jumlah Pihak dan Jam Pelayanan Posbakum selama Tahun 2022**

NO	BULAN	WAKTU PELAYANAN (JAM)	JUMLAH PIHAK YANG DILAYANI (ORANG)
1.	JANUARI	30 JAM	9
2.	FEBRUARI	30 JAM	10
3.	MARET	30 JAM	7
4.	APRIL	30 JAM	5
5.	MEI	30 JAM	7
6.	JUNI	30 JAM	5
7.	JULI	30 JAM	18
8.	AGUSTUS	30 JAM	7
9.	SEPTEMBER	30 JAM	6
10.	OKTOBER	30 JAM	8
11.	NOVEMBER	30 JAM	8
12.	DESEMBER	30 JAM	3
TOTAL		360 JAM	93

#### **E. Sidang Keliling /Pelayanan Terpadu**

Pelaksanaan Sidang Keliling dan Pelayanan Terpadu telah dilaksanakan di Tahun 2022 dengan jumlah 42 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perkara Cerai Gugat sebanyak : 0 perkara
- b. Perkara Cerai Talak sebanyak : 0 perkara
- c. Perkara Isbat Nikah sebanyak : 42 perkara
- d. Perkara putus sebanyak : 31 perkara
- e. Perkara digugurkan sebanyak : 8 perkara
- f. Perkara dicabut sebanyak : 3 Perkara

Pada Tahun 2022 ini, Sidang Keliling dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian lokasinya sebagai berikut :

- a. Sidang Keliling bertempat Nangahure, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sebanyak 5 perkara.
- b. Sidang Keliling bertempat di Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebanyak 25 perkara.
- c. Sidang Keliling bertempat di Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebanyak 10 perkara.
- d. Sidang Keliling bertempat di Pulau Besar, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sebanyak 2 perkara.

Gambar. 4. Foto Kegiatan Sidang Keliling Desa Parumaan, Kec. Talibura PA. Maumere



Gambar. 5. Foto Kegiatan Sidang Keliling Desa Parumaan, Kec Talibura PA. Maumere



Gambar. 6. Foto Kegiatan Sidang Keliling Nangahure, Kec Alok Barat PA. Maumere



#### F. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Perkara Prodeo merupakan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere yang beban biaya perkaranya ditanggung oleh Negara, sesuai alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022, yang syarat untuk mendapatkan layanan prodeo dari Pengadilan Agama Maumere dengan melampirkan Surat Permohonan berperkara secara Prodeo, Fc. Kartu Tanda Penduduk/Domisili dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)/ Kartu Indonesia Sehat maupun kartu lainnya yang menyatakan warga miskin sebagaimana amanah dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Untuk Tahun 2022 jumlah perkara prodeo DIPA dan Non DIPA yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere adalah sebanyak 81 perkara dengan rincian sebagai berikut :

a. Perkara Cerai Talak sebanyak :	0 perkara
b. Perkara Cerai Gugat sebanyak :	2 perkara
c. Perkara Isbat Nikah sebanyak :	38 perkara
d. Perkara putus sebanyak :	59 perkara
e. Perkara digugurkan sebanyak :	13 perkara
f. Perkara Cabut :	7 perkara
g. Perkara Tolak :	2 perkara
h. Sisa :	0 perkara

## BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA

## A. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan, Golongan, dan Pendidikan



Gambar 7. Foto SDM aparatur PA Maumere  
Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting, dimana Aparatur Peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam

rangka mencapai tujuan *Good Government*. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Aparatur Peradilan Agama) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang peradilan. Sehingga SDM yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen SDM yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi. Sejalan dengan arahan Reformasi Birokrasi, Pengadilan Agama Maumere telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi.

Dalam memperoleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, terintegrasi dan profesional, Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan Pembinaan internal untuk pegawai Pengadilan Agama Maumere dengan dilaksanakan apel pagi setiap hari Senin dan apel sore setiap hari Jum'at,

rapat bulanan secara berkala juga mengikutsertakan pegawai pada kegiatan-kegiatan Diklat, Sosialisasi, Pelatihan/Bimbingan Teknis Yustisial maupun Tata Kelola Keuangan pada Diklat di Tempat Kerja (DDTK) itu sendiri. Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tersebut semakin lebih ditingkatkan khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur maupun dalam peningkatan pelayanan bagi para pencari keadilan seperti Implementasi Pelayanan PTSP dengan prinsip 5 S (Senyum, Salam, Sopan, Santun, Sapa) dan 5 (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) serta indah dan nyaman, maupun sosialisasi implementasi 13 (tiga belas) aplikasi unggulan Badan Peradilan Agama yang kegiatannya diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere secara berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Maumere dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Maumere.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2022 adalah 15 Pegawai, lebih rinci keadaannya dapat dilihat dari paparan tabel sebagai berikut :

**Tabel. 17. Bagan nama –nama Pegawai Pengadilan Agama Maumere**

No	Nama	Jabatan	Pangkat/ Gol. Ruang
1	Suratnah Bao, S.Ag., M.H	Ketua	Pembina, IV/a
2	Achmad Iftauddin, S.Ag	Wakil Ketua	Pembina, III/d
3	Ahmad Muliadi, S.Sy.	Hakim Pratama	Penata muda Tk. I, III/b
4	Mustajib, S.H.I.	Panitera	Penata Tk. I, III/d
5	Jufri Endo, S.H.I.	Sekretaris	Penata, III/d
6	Abdullah, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Penata Tk. I, III/d

7	Mohammad Rizky, S.H	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata, III/c
8	Sigit Apriluberta, S.H.	Panmud Permohonan	Penata Muda, Tk.I, III/c
9	Achmad Hanif, S.Kom	Kasubag Umum Dan Keuangan	Penata, III/c
10	Hamzah Usman	Jurusita	Pengatur Muda Tk.I, II/b
11	Imam Prabowo, SH	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda/IIIa
12	M. A . Husnirafi, S.Kom	Pranata Komputer	Penata Muda/IIIa
13	Ardiansyah Iksaniyah Putra, S.H., M.H	CPNS	Penata Muda/IIIa
14	Muhammad Kharisma Bayu Aji, S.H	CPNS	Penata Muda/IIIa
15	Andi Abelia Reza, A.Md	CPNS	Pengatur/IIc

Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Maumere berdasarkan penggolongan yudisial adalah sebagai berikut :

- **Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial**

Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Maumere terdiri dari :

- a. 3 orang Hakim, dengan uraian sebagai berikut :
  - 1) 1 Orang Ketua
  - 2) 1 Orang Wakil Ketua
  - 3) 1 Orang Hakim
- b. 1 Orang Panitera dan 2 Panitera Muda, dengan uraian sebagai berikut:
  - 1) 1 Orang Panitera

- 2) 1 Orang Panitera Muda Hukum
- 3) 1 Orang Panitera Muda Permohonan
- c. 1 Orang Jurusita.

- **Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial**

Sumber daya manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Agama Maumere tahun 2022 terdiri dari:

- a. 1 orang Sekretaris ;
- b. 1 orang Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- c. 1 orang Kasubag Umum & Keuangan ;
- d. Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana ( Mengalami Kekosongan Jabatan, sementara dijabat oleh Pelaksana Tugas)
- e. 1 orang Bendahara di Perbantukan (merangkap jabatan Jurusita)
- f. 1 orang Analis Perkara Peradilan
- g. 1 orang Pranata Komputer
- h. 3 CPNS
- i. Semua kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan (Bendaharawan, Arsiparis, dan Pustakawan) masih mengalami kekosongan sejak Tanggal 28 Desember 2015 sampai saat ini;

Dalam menjalankan pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Maumere disamping Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis dan Non Teknis Yudisial, juga dibantu dengan tenaga PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) yang sumber pembiayaannya berasal dari Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2022 yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari :

- b. Pegawai Honorer/Pramubhakti 3 orang;
- c. Pegawai Honorer/Pengamanan Sidang 1 orang; dan
- d. Pegawai Honorer/Sopir 2 orang.

yang diperbantukan 2 orang di bidang Kesekretariatan dan 4 orang di bidang Kepaniteraan.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) PPNPN lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel . 18. Daftar Nama Tenaga Honorer/Pramubhakti PA. Maumere**

No	Nama	Tahun Masuk/ Pendidikan	Jabatan Tugas	Tugas Tambahan	Jumlah
1	Saudah Yahya, S.H.I.	2001 S.1	Pramubhakti	Staf Umum (Operator Aplikasi Surat dan Petugas Kearsipan Bidang Kesekretariatan)	1
2	M. Ikram Muslimin, S.E.	2012 Tahun, S.1	Pramubhakti	Staf Kesekretariatan (Admin IT)	1
3	Nasarudin U Mau	2014 SMA	Satpam	Pengamanan Kantor dan Pengamanan Sidang	1
4	Ika Asti Hana, S.E.	2015, S.1	Pramubhakti	Staf Kepaniteraan Penulis Register dan Buku Induk Keuangan	1
5	Muhammad Fauzi Lanjar	2016 SMA	Sopir	Staf Kepaniteraan	1
6	Mohamad Al-Amin	2018, SMA	Sopir	Staf Kesekretariatan	1
<b>JUMLAH</b>					<b>6</b>

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang;  
Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang pangkat/golongan ruang dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel . 19. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pangkat/Golongan ruang**

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1 Orang
2	Penata Tk. I	III/d	4 Orang

3	Penata	III/c	3 Orang
4	Penata Muda Tk. I	III/b	1 Orang
5	Penata Muda	III/a	4 Orang
6	Pengatur Muda Tk. I	II/c	2 Orang

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan jejang pendidikan;

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel . 20. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S. 2	3 Orang
2	S. 1	10 Orang
3	D III	1 Orang
4	SMA / Madrasah Aliyah	1 Orang

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan jenis Kelamin;

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel . 21. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	13 Orang
2	Perempuan	2 Orang

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan usia;

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang Usia dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel . 22. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Usia**

No	Usia	Jumlah
1	22 s.d. 29	6 Orang
2	30 s.d. 39	3 Orang

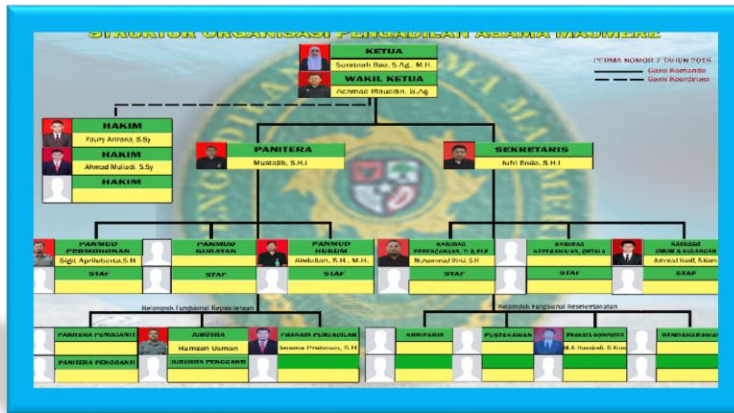
3	40 s.d. 49	3 Orang
4	50 s.d. 59	3 Orang
5	60 s.d. 66	0 Orang

#### ❖ Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere telah mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua sebagai Pimpinan yang membawahi para Hakim sebagai pejabat fungsional dalam mengadili dan memutus perkara yang diajukan, dan selanjutnya ada 2 (dua) yaitu bidang pertama yaitu Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera yang membawahi Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum serta Jabatan Fungsional kepaniteraan yaitu Panitera Pengganti, Jurusita/jurusita Pengganti dan Pranata Peradilan. Kemudian bidang kedua yaitu Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Umum dan Keuangan, serta Jabatan fungsional Kesekretariatan yaitu Fungsional Bendahara, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Pustakawan.

Secara umum stuktur organisasi Pengadilan Agama Maumere menggambarkan suatu susunan dan hubungan kerja baik secara komando maupun kordinasi tiap bagian yang pemisahannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere tahun 2022 sebagai berikut :



Gambar. 8. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama Maumere tersebut diatas, Pengadilan Agama Maumere membagi tugas para pejabat dilingkungan satuan kerja sebagai berikut:

### 1. Ketua

Ketua Pengadilan Agama Maumere (Suratnah Bao, S.Ag., M.H) mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Maumere serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Pengadilan Agama Maumere (Suratnah Bao, S.Ag., M.H) menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Maumere sejak 18 Januari 2022 sampai dengan sekarang. Lebih rinci dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 23. Bagan nama Ketua Pengadilan Agama Maumere

No	Nama Pejabat	Jabatan	TMT Jabatan	Ket
1	Suratnah Bao, S.Ag., M.H	Ketua	18 Januari 2022 s.d. Sekarang	Aktif

### 2. Wakil Ketua

Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere (Achmad Iftauddin, S.Ag) mempunyai tugas dan fungsi mewakili Ketua Pengadilan Agama Maumere dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Maumere serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan

kebijakan teknis Direktur Jenderal badan Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Wakil Ketua (Achmad Iftauddin, S.Ag) Pengadilan Agama Maumere telah menjabat sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai sekarang. Dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel. 24. Bagan nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere**

No	Nama Pejabat	Jabatan	TMT Jabatan	Ket
1	Achmad Iftauddin, S.Ag	Wakil	09 Desember 2022 s.d. Sekarang	Aktif

### 3. Hakim

Hakim Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas dan fungsi untuk meneliti dan mencatat berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang (Hakim Tunggal), menyidangkan perkara, memuat putusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere.

Hakim Pengadilan Agama Maumere dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 25. Bagan nama Hakim Pengadilan Agama Maumere**

No	Nama	GOL.	TMT Hakim	Masa Kerja	Ket
1	Suratnah Bao, S.Ag., M.H	IV/a	29-07-2009	13 Tahun 06 Bulan	Aktif
2	Achmad Iftauddin, S.Ag	III/d	01-04-2014	8 Tahun 08 Bulan	Aktif
4	Ahmad Muliadi, S.Sy	III/b	27-04-2020	1 Tahun 08 Bulan	Aktif

### 4. Panitera

Panitera Pengadilan Agama Maumere (Mustajib, S.H.I) bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi kepaniteraan, administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya dilingkungan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawahi Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

### 5. Panitera Muda

**a. Panitera Muda Hukum**

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Maumere (Abdullah, S.H., M.H) bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara, menyajikan statistik data perkara, menyusun/membuat laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan melakukan pengurusan administrasi, pemberian keterangan dan mengkoordinir, memasukkan data perkara, anonimasi perkara yang putus dan berkekuatan hukum tetap serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**b. Panitera Muda Gugatan**

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Maumere bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan, untuk Jabatan Panitera Muda Gugatan mengalami kekosongan jabatan dari tanggal 01 Agustus Tahun 2020.

**c. Panitera Muda Permohonan**

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Maumere (Sigit Apriluberta, S.H) bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan.

**6. Panitera Pengganti**

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, serta membuat berita acara sidang semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara Majelis Hakim/Hakim tersebut, dan juga menyelesaikan administrasi persidangan. Secara realitas jabatan Panitera Pengganti yang ada di Pengadilan Agama Maumere saat ini tidak ada. Untuk sementara Panitera Sidang/Panitera Pengganti di rangkap oleh Panitera (Mustajib, S.H.I), Panitera Muda Hukum

(Abdullah, S.H., M.H) dan panitera Muda Permohonan(Sigit Apriluberta,S.H) keadaan panitera sidang/pengganti dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 26. Bagan nama Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere

No	Nama	GOL.	TMT Panitera Pengganti	Masa Kerja	Ket
2	Mustajib, S.H.I	III/d	13-11-2020	00 Tahun 02 Bulan	Aktif
3	Abdullah, S.H., M.H.	III/d	04-01-2016	03 Tahun 11 Bulan	Aktif
4	Sigit Apriluberta, S.H.	III/c	01-08-2019	1 Tahun 04 Bulan	Aktif

## 7. Jurusita

Jurusita Pengadilan Agama Maumere (**Hamzah Usman**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan semua perintah yang berhubungan dengan tugas-tugas kejurusitaan antara lain Pemanggilan para pihak, menyampaikan Pengumuman, Teguran (Anmaning) melakukan penyitaan, dan membuat berita acara penyitaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis/Hakim yang dikoordinir oleh Panitera.

## 8. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama Maumere (**Jufri Endo, S.H.I**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi kepada semua unsur di Pengadilan Agama Maumere serta membawahi Kepala Sub Bagian (Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan), (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana), (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan), Jabatan Fungsional Kesekretariatan (Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, dan Bendahara) dan Staf Kesekretariatan.

## 9. Kepala Sub Bagian

### a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Maumere (**Mohammad Rizki, S.H**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, statistik, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi, serta Pelaporan.

**b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan Kepegawaian, Penataan organisasi dan Tata Laksana, untuk saat ini Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mengalami Kekosongan Jabatan.

**c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Maumere (Achmad Hanif, S.Kom) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, pengarsipan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta pengelolaan keuangan, Untuk saat ini Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pada Pengadilan Agama Maumere mengalami kekosongan Jabatan

**1. Mutasi**

Mutasi yang merupakan salah satu hal yang selalu dilakukan untuk memenuhi hak-hak personal maupun demi kebutuhan organisasi, yang terkadang cenderung teraktualisasi sebagai *Reward* namun ada juga sebagai *Punishment*. Regulasi pengaturan mutasi baik Hakim, tenaga teknis Kepaniteraan dan Juga Tenaga Kesekretariatan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Penggambaran secara lebih detail terdapat mutasi pegawai Pengadilan Agama Maumere dirincikan pada tabel sebagai berikut :

**a. Mutasi Tempat Tugas**

- 1) Pegawai yang mutasi masuk di Pengadilan Agama Maumere periode tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel . 27. Keadaan Pegawai yang mutasi masuk PA. Maumere**

No	Nama	Jabatan		TMT	No. SK
		Lama	Baru		
1	Achmad Iftauddin, S.Ag	Hakim PA Tanggamus	Wakil Ketua PA Maumere	09 Desember 2022	339/KMA/SK/XI/2022

- 2) Pegawai yang mutasi keluar di Pengadilan Agama Maumere tahun 2022 tidak dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel . 28. Keadaan Pegawai yang mutasi Keluar PA. Maumere**

No	Nama	Jabatan		TMT	No. SK
		Lama	Baru		
1	Fauzy Arizona, S.Sy	Hakim	Hakim	28 November 2022	339/KMA/SK/XI/2022

➤ **Mutasi Kenaikan Pangkat/Golongan, yaitu :**

Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang Kenaikan Pangkat periode tahun 2022 sebanyak 2 (dua) orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel . 29. Keadaan Kenaikan Pangkat/Golongan pegawai PA. Maumere**

No	Nama	Pangkat Gol. Ruang		TMT	No. SK
		Lama	Baru		
1	Hamzah Usman	Pengatur II/b	Pengatur II/c	01/10/2022	W23-A/1630.a/KP.04.1/SK/X/2022

➤ **Mutasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB)**

Untuk Periode Tahun 2022 tidak terdapat Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang mengalami Kenaikan Gaji Berkala (KGB) .

Tabel . 30. Keadaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai PA. Maumere

No	Nama	TMT KGB		No. SK.	Tanggal Usul
		Saat ini	YAD		
1	-	-	-	-	-

**2. Promosi**

Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang mendapatkan Promosi periode tahun 2022 sebanyak 1 (satu) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 31. Keadaan Promosi pegawai PA. Maumere

NO	NAMA	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	-	-	-	-

**3. Pensiun**

Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang mengalami masa pensiun periode tahun 2022 tidak ada.

Tabel . 32. Keadaan Pegawai pension PA. Maumere

No	Nama	Pangkat / gol.Ruang	Jabatan	TMT	Ket
1	2	3	4	5	
1	-	-	-	-	-

**4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)**

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis sumber daya manusia telah diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek baik

yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur atau lembaga pemerintah lainnya.

Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek yang telah diikuti oleh pegawai teknis maupun non teknis selama kurun waktu tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Diklat SDM Teknis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022

**Tabel . 33. Diklat SDM Teknis pegawai PA. Maumere**

NO	N a m a	Nama Diklat/Bimtek	Lama/ Waktu Diklat/Bimtek	Penyelenggara
1	Muhammad Kharisma Bayu Aji, S.H	Pelatihan Dasar CPNS	90 Hari Media Zoom dan 6 hari BDK Surabaya	Balai Diklat Keagamaan Surabaya
2	Ardiansyah Iksaniyah Putra, S.H., M.H.	Pelatihan Dasar CPNS	90 Hari Media Zoom dan 6 hari BDK Surabaya	Balai Diklat Keagamaan Surabaya
3	Andi Abelia Reza,A.Md	Pelatihan Dasar CPNS	90 Hari Media Zoom dan 6 hari BDK Surabaya	Balai Diklat Keagamaan Surabaya

- b. Diklat SDM Non Teknis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022

**Tabel . 34. Diklat SDM Non Teknis pegawai PA. Maumere**

NO	N a m a	Nama Diklat/Bimtek	Lama Diklat/Bimtek	Penyelenggara
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Agama Maumere pada Tahun Anggaran 2022 mengelola 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi dengan nomor DIPA : SP DIPA-005.01.2.402851/2022 tanggal 17 November 2021, memiliki Pagu Awal sebesar Rp. 2.805.015.000 (*dua miliar delapan ratus lima juta lima belas ribu Rupiah*). Sedangkan untuk Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan nomor DIPA : SP DIPA-005.04.2.402852/2022 tanggal 17 November 2021, memiliki Pagu Awal Sebesar Rp. 112.914.000 (*seratus dua belas juta Sembilan ratus empat belas ribu Rupiah*). Terjadi 7 kali revisi Anggaran untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi dikarenakan pagu anggaran yang ada kurang atau berlebih, penyesuaian rencana kegiatan dan dana yang tersedia, dengan terakhir revisi pada tanggal 26 Desember 2022 dikarenakan pemutakhiran data POK. adapun Detail realisasi pagu per jenis belanja pada masing-masing unit organisasi adalah sebagai berikut :

#### 1. Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi

##### a. Belanja Pegawai

Pagu belanja pegawai pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 1.752.223.000 (*satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah*). Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang peruntukannya antara lain untuk gaji, tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Selama satu tahun anggaran mengalami satu kali revisi, sampai dengan revisi terakhir pada tanggal 13 Oktober 2022 dikarenakan terdapat pagu lebih. Sehingga Pagu untuk belanja pegawai

berkurang menjadi Rp.1.617.086.000,- (*Satu Milyar enam ratus tujuh belas juta delapan puluh enam ribu Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 35. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (dalam rupiah)**

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	1.617.086.000	1.514.756.047	93,67%	102.329.953

**b. Belanja Barang**

Pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 1.179.859.000 (*satu milyar seratus tujuh puluh sembilan tujuh delapan ratus lima puluh Sembilan ribu Rupiah*). Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Selama satu tahun anggaran mengalami beberapa revisi, sampai dengan revisi ke-7 dan terakhir revisi pada tanggal 29 Desember 2022. Revisi tersebut adalah pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK), Sehingga Pagu untuk belanja barang berkurang menjadi Rp. 1.177.929.000,- (*satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 36. Realisasi Anggaran Belanja Barang (dalam rupiah)**

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Barang	1.177.929.000	1.165.875.990	98,98 %	12.053.010

c. **Belanja Modal**

Pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022 17 November 2021 sebesar Rp. 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*). Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 37. Realisasi Anggaran Belanja Modal (dalam rupiah)**

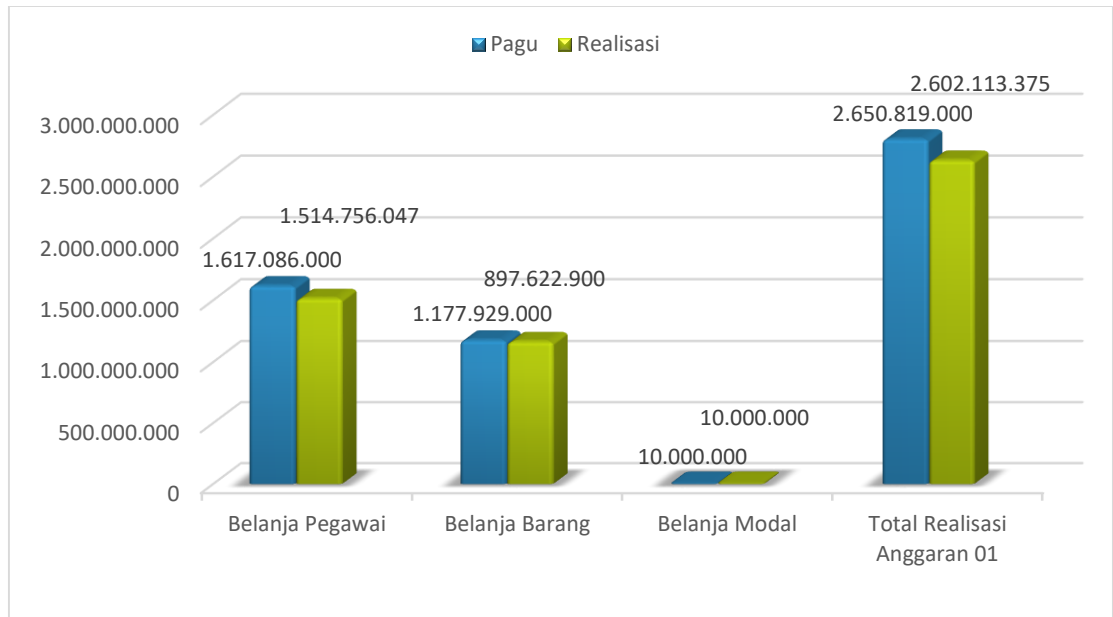
No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Modal	10.000.000	10.000.000	100 %	0

Realisasi Anggaran untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi, digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 38. Realisasi Anggaran Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi**

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	1.617.086.000	1.514.756.047	93,67%	102.329.953
2	Belanja Barang	1.177.929.000	1.65.875.990	98,98 %	58.762.810
3	Belanja Modal	10.000.000	10.000.000	100 %	0
<b>Total Realisasi</b>		<b>2.805.015.000</b>	<b>2.690.632.037</b>	<b>95,92 %</b>	<b>114.382.963</b>

**Grafik 4. Persentase Realisasi Anggaran Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2022**



## 2. Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

### a. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara

Pagu pembebasan biaya perkara untuk peningkatan manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 26.240.000,- (*Dua Puluh Enam Juta dua ratus empat puluh rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 39. Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	BelanjaPembebasan Biaya Perkara	26.240.000	25.940.000	98,86 %	300.000

### b. Biaya Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan

Pagu biaya penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan untuk peningkatan manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran kementerian

lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 56.674.000,- (*Lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 40. Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Pengadilan (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	BelanjaPenyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan	56.674.000	56.674.000	100 %	0

#### c. Jasa Konsultasi Bantuan Hukum

Pagu jasa konsultasi bantuan hukum untuk peningkatan manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 61.952.000,- (*Enam puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 41. Realisasi Anggaran Jasa Konsultasi Bantuan Hukum (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	BelanjaJasa Konsultasi Bantuan Hukum	30.000.000	30.000.000	100 %	0

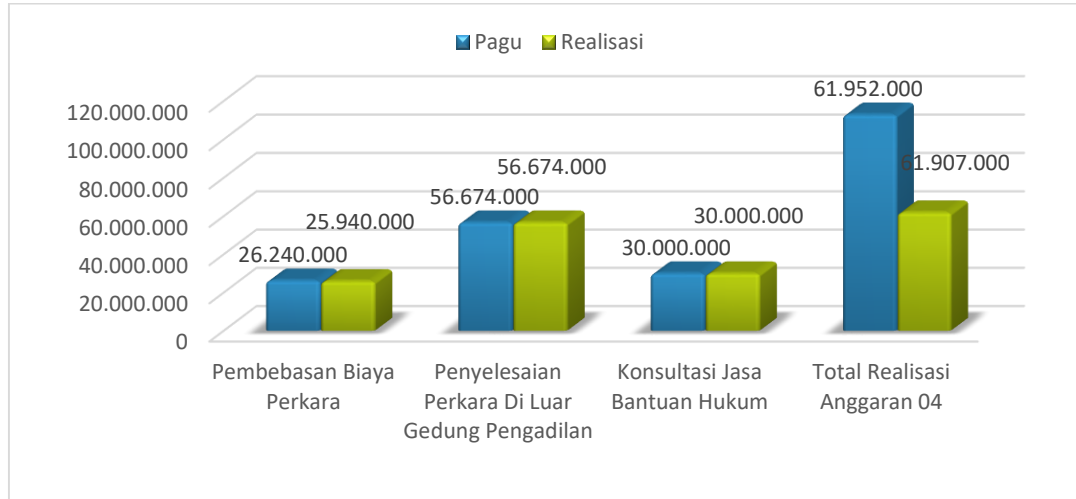
Realisasi Anggaran untuk Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 42. Realisasi Anggaran Unit Organisasi (04) Badan Peradilan Agama

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	BelanjaPembebasan Biaya Perkara	26.240.000	25.940.000	98,86 %	300.000
2	BelanjaPenyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan	56.674.000	56.674.000	100 %	0
3	Belanja Jasa Konsultasi Bantuan Hukum	30.000.000	30.000.000	100 %	0

Total Realisasi	112.914.000	61.907.000	99,93%	300.000
-----------------	-------------	------------	--------	---------

Grafik 5. Persentase Realisasi Anggaran Unit Organisasi (04) Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022



## B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Agama Maumere sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik kepada para pencari keadilan. Mulai Tahun 2013, Pengadilan Agama Maumere telah menempati gedung Kantor baru yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kecamatan Alok Barat, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Dengan ditempatinya gedung kantor baru ini, diharapkan pelayanan publik yang diberikan kepada para pencari keadilan dapat lebih optimal karena sarana dan prasarana yang ada sudah cukup menunjang. Sehingga tahun demi tahun kantor Pengadilan Agama Maumere terus berusaha untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan prima kepada para pencari keadilan walaupun masih jauh dari sempurna. Sarana dan prasarana yang dimiliki sampaidengan tahun 2019 sebagai berikut :

## 1. Matriks Sarana dan Prasarana Gedung



**Gambar 9. Foto Sarana gedung PA. Maumere**

Kantor Pengadilan Agama Maumere memiliki luas tanah keseluruhan 3.840 M<sup>2</sup>, dengan luas bangunan kantor 500 m<sup>2</sup> x 2 lantai = 1.000 M<sup>2</sup> yang diresmikan pada 31 Januari 2017 oleh Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Adapun matriks sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel . 43. Sarana dan Prasarana Kantor PA. Maumere**

NO	Uraian	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
<b>9.</b>	<b>PA. MAUMERE</b>				
<b>I</b>	<b>Sarana / Prasarana Gedung</b>				
1	Ruang Ketua	1	1	-	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	1	-	-
3	Ruang Hakim	1	1	-	-
4	Ruang Panitera	1	1	-	-
5	Ruang Sekretaris	1	1	-	-
6	Ruang Sidang Utama	1	1	-	-
7	Ruang Sidang II	1	1	-	-
8	Ruang Kepaniteraaan	1	1	-	-
9	Ruang Kesekretariatan	1	1	-	-
10	Ruang PP/JSP	1	1	-	-
11	Ruang Kasir	1	1	-	-
12	Ruang Bendahara	1	1	-	-
13	Ruang Posbakum	1	1	-	-
14	Ruang Server	1	1	-	-
15	Ruang Mediasi	1	1	-	-
16	Ruang PTSP	1	1	-	-
17	Ruang Rapat	1	1	-	-
18	Ruang Arsip Perkara	1	1	-	-
19	Ruang Arsip Umum	1	1	-	-
20	Ruang Perpustakaan	1	1	-	-
21	Ruang Tamu	1	1	-	-

22	Ruang Musholla	1	1	-	-
23	Ruang Laktasi dan Bermain Anak	1	1	-	-
24	Ruang Tunggu Sidang	1	1	-	-
25	Ruang Tunggu Mediasi	1	1	-	-
26	Ruang Tunggu PTSP	1	1	-	-
27	Pos Satuan Pengamanan	1	1	-	-
28	Ruang Gudang	1	1	-	-
<b>II</b>	<b>Sarana /Prasarana Fasilitas</b>				
1.	Lemari Besi	30	30	-	-
2.	Lemari Kayu	26	16	-	10
3.	Rak Besi	10	7	-	3
4.	Rak Kayu	13	10	-	3
5.	Filling Cabinet Besi	7	5	-	2
6.	Brankas	2	2	-	-
7.	Lemari Display	1	1	-	-
8.	Tabung Pemadam Api	2	2	-	-
9.	CCTV	1	1	-	-
10.	Papan Visual	19	10	-	9
11.	Alat Penghancur Kertas	1	1	-	-
12.	Mesin Absensi	2	1	-	1
13.	LCD Proyektor	1	1	-	-
14.	Teralis	1	1	-	-
15.	Meja Kerja Kayu	56	41	-	15
16.	Kursi Besi/ Metal	74	63	-	13
17.	Kursi Kayu	34	8	-	26
18.	Sice	7	4	-	3
19.	Bangku Panjang Kayu	5	2	-	3
20.	Meja Rapat	4	2	-	2
21.	Meja Komputer	7	4	-	3
22.	Meja Telepon	1	1	-	-
23.	Meja Resepsionis	1	1	-	-
24.	Kursi Fiberglass/Plastik	10	-	-	10
25.	Jam Elektronik	4	2	-	2
26.	AC Split	15	12	-	3
27.	Kipas Angin	7	3	-	4
28.	Kitchen Set	1	1	-	-
29.	Tandon Air	1	1	-	-
30.	Televisi	6	3	-	3
31.	Sound System	1	-	-	1
32.	Stabilisator	6	4	-	2
33.	Lambang Garuda Pancasila	3	3	-	-
34.	Tiang Bendera	5	2	-	3

35.	Kaca Hias	17	15	-	2
36.	Dispenser	5	4	-	1
37.	Mimbar/ Podium	4	4	-	-
38.	Palu Sidang	1	1	-	-
39.	Lambang Instansi	3	2	-	1
40.	HandyCam	1	1	-	-
41.	Karpet	1	1	-	-
42.	Gordyn/Kray	16	16	-	-
43.	UPS	5	4	-	1
44.	Camera Digital	1	1	-	-
45.	LCD Monitor	1	1	-	-
46.	PABX	1	1	-	-
47.	Pesawat Telepon	17	16	-	1
48.	Faksimile	1	-	-	1
49.	Scanner	2	2	-	-
50.	Genset	2	1	-	1
51.	PC Unit	23	18	-	5
52.	Laptop	17	13	-	4
53.	Printer	26	10	-	16
54.	Server	2	1	-	1
55.	Router	1	1	-	-
56.	Portable Hardisk	2	-	-	2
57.	Rak Server	1	1	-	-

Selain sarana dan prasarana yang ada saat ini di Pengadilan Agama Maumere yang terdaftar dalam Barang Milik Negara (BMN), di tahun 2022 Pengadilan Agama Maumere melakukan pengadaan Tambahan alat pengolah data pendung Pc All in untuk Kepaniteraan, serta mesin Fotocopy dengan status pinjam pakai dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel . 44.Sarana dan prasarana Kantor PA. Maumere

No	Uraian Jenis Barang/Alat	Tanggal/ Tahun Perolehan	Kondisi			Status Perolehan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	PC	11-06-2022	√			Pembelian Satker
2	Mesin Fotocopy	05-05-2022	√			Pinjam Pakai

## 2. Matriks Barang Milik Negara

### a. Kendaraan Dinas

Sebagai sarana penunjang kerja serta untuk memperlancar operasional aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Maumere memiliki 7 buah kendaraan dinas yang dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel . 45.Matriks BMN PA. Maumere Tahun 2022

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1	Toyota Innova	2007	✓			
2	Suzuki APV Arena	2011	✓			
<b>II</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1	Suzuki Satria RU 120	2000			✓	
2	Supra Fit NF 100 SL	2006	✓			
3	Karisma X 125 D NF 125 D	2006	✓			
4	Supra X 125 D NF 125 D	2005	✓			
5	Suzuki Thunder	2007	✓			

**b. Rumah Dinas dan Mess Pegawai**

Pengadilan Agama Maumere memiliki sebuah rumah dinas yang diperuntukan bagi Ketua PA, jenis bangunan Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen tahun perolehan 2010 yang beralamat di Jl. Waiklau No. 60, Madawat, Maumere. Sedangkan yang menjadi Mess Pegawai merupakan Gedung Kantor Lama Pengadilan Agama Maumere yang beralamat di Jl. Waiklau No. 56, Madawat Maumere. Alih fungsi gedung kantor lama ini didasarkan pada SK. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 740/SEK/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Gedung Kantor Pengadilan Agama Maumere Yang Lama Menjadi Tanah Dan/Atau Bangunan Mess. Lengkapnya dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel . 46.Rumah dinas dan Mess pegawai PA. Maumere

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>Rumah Dinas</b>					
<b>1</b>	Rumah Dinas Ketua	1	✓			
<b>II</b>	<b>Mess Pegawai</b>					
<b>1</b>	Mess Pegawai	1	✓			

### 3. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

#### a. Pengadaan Sarana Pengadilan Agama Maumere

Untuk menunjang kinerja aparat peradilan dan kelancaran dalam pelayanan kepada para pihak pencari keadilan pada tahun 2022, Pengadilan Agama Maumere mendapatkan alokasi belanja modal untuk Pengadaan Alat Pengolah Data Penunjang SIPP berupa dua (2) buah Printer untuk Kepaniteraan dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000.

#### b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Maumere yang disediakan dalam DIPA tahun Anggaran 2022 meliputi pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan sertamesin dengan rincian dan realisasi sebagai berikut:

Tabel . 47.Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kantor PA. Maumere

No	Jenis Belanja Barang	Pagu Anggaran	Rincian Pemeliharaan	Realisasi Anggaran
<b>1</b>	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 375.412.000	Perawatan Gedung dan Halaman Kantor	Rp. 375.110.500

2	Pemeliharaan	Rp. 3.900.000	- Genset	Rp. 3.838.000
	Peralatan dan	Rp. 10.180.000	- PC	Rp. 10.180.000
	Mesin	Rp. 5.840.000	- Laptop	Rp. 5.840.000
		Rp. 14.320.000	- Roda 2	Rp. 14.320.000
		Rp.6.900.000	- Printer	Rp. 6.900.000
		Rp. 7.320.000	- AC	Rp. 7.320.000
		Rp. 42.772.000	- Roda 4	Rp. 42.772.000
		Rp.12.050.000	- BBM Roda 4	Rp. 12.050.000

#### c. Alih Fungsi dan Penghapusan BMN

Pada Tahun 2022 Pengadilan Agama Maumere tidak terdapat alih fungsi dan Penghapusan Barang Milik Negara akan tetapi terdapat penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan bangunan kantor Pengadilan Agama Maumere berdasarkan Keputusan Menteri keuangan RI Nomor 349/KM.6/WKN.14/KNL.05/2022 tanggal 26 Juni Tahun 2022.

#### 4. Administrasi Tata Persuratan

Selama tahun 2022 Pengadilan Agama Maumere telah mengelola surat masuk sebanyak 110 surat sedangkan surat keluar sebanyak 891 surat. Rekapitulasi surat masuk dan surat keluar sesuai dengan kode klasifikasi selama tahun 2022 sebagai berikut :

##### a. Surat Masuk

Tabel . 48.Surat Masuk PA. Maumere Tahun 2022

Bulan	KP	KU	PL	PP	PB	PS	OT	KS	HM	HK	Jumlah
Januari	1	-	1	1	-	2	2	-	5	-	12
Pebruari	10	1	-	1	-	-	7	-	8	6	15
Maret	2	-	-	-	-	-	1	-	5	7	15
April	3	1	-	1	-	-	2	-	1	2	10
Mei	2	1	-	1	-	-	2	-	7	2	12
Juni	5	-	-	1	-	2	3	-	7	3	21
Juli	7	-	1	-	-	-	7	-	3	-	16
Agustus	6	1	2	1	-	1	1	-	2	7	21
September	-	-	2	1	-	1	3	-	2	-	9
Oktober	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	5

Nopember	1	1	-	1	-	1	1	-	7	2	14
Desember	2	-	-	1	-	-	5	-	4	-	12
<b>Jumlah</b>											<b>110</b>

**b. Surat Keluar**

Tabel . 49. Surat Keluar PA. Maumere Tahun 2022

Bulan	KP	KU	PL	PP	PB	PS	OT	KS	HM	HK	Jumlah
Januari	138	12	1	-	-	-	2	-	2	20	175
Pebruari	18	8	1	1	-	2	5	-	7	15	57
Maret	54	11	3	1	-	-	8	-	5	11	93
April	8	9	2	-	-	-	3	-	9	4	35
Mei	8	13	-	-	-	-	3	-	-	6	30
Juni	12	10	4	-	-	-	6	-	2	4	38
Juli	10	7	3	-	-	-	3	-	3	5	31
Agustus	12	13	-	-	-	-	4	-	2	8	39
September	66	10	1	-	-	-	4	-	5	6	92
Oktober	15	18	1	1	-	1	3	-	3	5	47
Nopember	16	7	-	-	-	-	-	-	7	2	32
Desember	30	8	-	-	-	-	5	-	1	8	52
<b>Jumlah</b>											<b>891</b>

**5. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Maumere memperoleh realisasi PNBP total sebesar **Rp. 7.508.373,-** Jumlah tersebut merupakan akumulasi perolehan PNBP yang berasal dari DIPA-005.01.2.402851/2022 (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp. 2.054.873,- dan DIPA-005.01.2.402851/2022 (Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama) sebesar rp. 5.453.500,- Seluruh perolehan PNBP tersebut telah sepenuhnya disetorkan kepada negara. Adapun secara rinci realisasi pendapatan setiap akun akan dijabarkan sebagai berikut:

**a. DIPA-005.01.2.402851/2022**

No	Jenis Pendapatan	Potongan SPM (Rupiah)	Setoran MPN (Rupiah)	Jumlah
1	425131 - Rumah Dinas	654.873	1.400.000	2.054.873

**b. DIPA-005.01.2.402851/2022**

No	Jenis Pendapatan	Potongan SPM (Rupiah)	Setoran MPN (Rupiah)
----	------------------	-----------------------	----------------------

<b>1</b>	425239 – Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	-	3.183.500
<b>2</b>	425233 – Pendapatan Ongkos Perkara	-	1.890.000
<b>3</b>	425232 – Pendapatan Uang meja (Leges) dan Upah pada Panitera dan Badan Peradilan		380.000
<b>Total</b>			<b>5.453.000</b>

## 6. Pengelolaan Teknologi Informasi

### - Implementasi *E-Court* di Lingkungan Peradilan Agama

*E-Court* atau yang lebih akrab dengan istilah peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung dibidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI). E-court merupakan suatu instrumen dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat daalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien

Pada saat ini pengaturan *e-court* didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mengubah sebagian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 209 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Sedangkan sebagai aturan pelaksanaanya, adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sendiri secara garis besar mengatur mengenai ruang lingkup dalam aplikasi E-Court ini ada 4 yaitu, perkara pendaftaran online (e-filing), pembayaran panjar biaya online (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), persidangan online (e-ligation).

Adapun menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, pengguna yang dapat beracara menggunakan *e-court* diperluas mencakup

pengguna terdaftar yang terdiri atas advokat, kurator dan pengurus. Sedangkan untuk pengguna lain meliputi subjek hukum selain pengguna terdaftar yang memenuhi syarat untuk menggunakan Sistem Informasi Pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

Beberapa perubahan lain yang termuat dalam substansi Perma Nomor 7 tahun 2022 meliputi:

- a. Istilah Domisili Elektronik diperluas tidak hanya mencakup surat elektronik tetapi juga layanan pesan (messaging service)
- b. Menambah pengaturan terkait domisili para pihak yang berada di luar negeri
- c. Kewajiban pihak yang mendaftarkan perkara secara elektronik untuk bersidang secara elektronik (e-litigasi)
- d. Pada Perma terbaru, panggilan secara elektronik pada pokoknya tidak hanya disampaikan kepada penggugat atau para pihak yang sejak awal proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik tapi juga kepada tergugat atau pihak lain yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan.
- e. Pengaturan upaya banding secara elektronik.
- f. Perubahan mekanisme proses jawab menjawab dan secara elektronik

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang dituntut untuk segera melaksanakan amanah dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 beserta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Sebagai wujud nyata Pengadilan Agama Maumere telah mengimplementasikan Aplikasi *E-Court* kepada para pencari keadilan di Wilayah Kabupaten Sikka, Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan kegiatan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) kepada Aparatur Peradilan khususnya di lingkup kepaniteraan yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 25 November 2022 bertempat di Media Center Pengadilan Agama Maumere. Kegiatan ini dimoderatori oleh M. Kharisma Bayu Aji, S.H, selaku CPNS Analis Perkara

Peradilan. Kegiatan ini membahas mengenai substansi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang baru saja disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, YM. Prof Dr. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H. mengenai administrasi dan persidangan secara elektronik.

Pengadilan Agama Maumere juga telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung antara lain Pojok *E-Court* dan Penunjukan Petugas *E-Court* yang terintegrasi dengan pelayanan PTSP Pengadilan Agama Maumere sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor : W23-A9/390/KP.00.3/SK/VI/2022 tentang Perubahan Penunjukkan Petugas PTSP Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 01 Juni 2022, hal ini guna mendukung implementasi pelayanan perkara secara *E-Court* yang maksimal demi mewujudkan dan meningkatkan kepuasan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam kurun waktu tahun 2022 Pengadilan Agama Maumere telah menerima sebanyak 61 perkara *e-court*. Dari jumlah perkara *e-court* tersebut 33 perkara diantaranya dilaksanakan secara *e-litigasi*. Jika dibandingkan dengan total keseluruhan perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere sepanjang tahun 2022 yaitu sebanyak 144 perkara maka pada tahun 2022 diperoleh capaian sebagai berikut:

- Presentase capaian perkara *e-court* tahun 2022 sebesar **42,3%**
- Presentase capaian *e-litigasi* terhadap perkara *e-court* sebesar **54%**

Perkara tersebut telah di laporkan kepada Drijen Badan Peradilan Agama secara berjenjang melalui Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

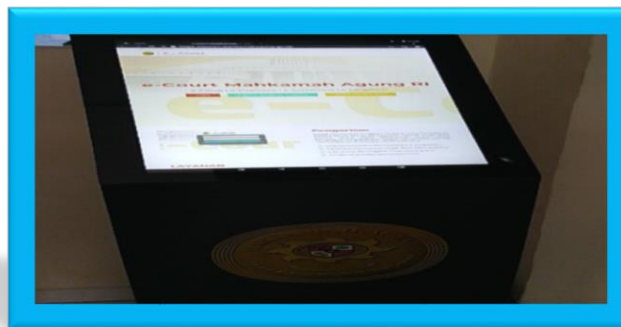
Selanjutnya jenis dan kategori perkara yang diajukan secara elektronik melalui *e-court* dan disidangkan secara *e-litigasi* akan dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

NO	PERKARA ECOURT	PERKARA ELITIGASI
<b>A. GUGATAN</b>		
1	1/Pdt.G/2022/PA.Mur	
2	2/Pdt.G/2022/PA.Mur	2/Pdt.G/2022/PA.Mur

3	3/Pdt.G/2022/PA.Mur	
4	4/Pdt.G/2022/PA.Mur	
5	5/Pdt.G/2022/PA.Mur	
6	6/Pdt.G/2022/PA.Mur	
7	7/Pdt.G/2022/PA.Mur	
8	8/Pdt.G/2022/PA.Mur	
9	9/Pdt.G/2022/PA.Mur	
10	10/Pdt.G/2022/PA.Mur	
11	11/Pdt.G/2022/PA.Mur	
12	12/Pdt.G/2022/PA.Mur	
13	13/Pdt.G/2022/PA.Mur	
14	16/Pdt.G/2022/PA.Mur	
15	17/Pdt.G/2022/PA.Mur	
16	18/Pdt.G/2022/PA.Mur	
17	19/Pdt.G/2022/PA.Mur	19/Pdt.G/2022/PA.Mur
18	20/Pdt.G/2022/PA.Mur	20/Pdt.G/2022/PA.Mur
19	21/Pdt.G/2022/PA.Mur	
20	22/Pdt.G/2022/PA.Mur	
21	23/Pdt.G/2022/PA.Mur	
22	24/Pdt.G/2022/PA.Mur	
23	25/Pdt.G/2022/PA.Mur	
24	26/Pdt.G/2022/PA.Mur	
25	27/Pdt.G/2022/PA.Mur	
26	28/Pdt.G/2022/PA.Mur	
27	29/Pdt.G/2022/PA.Mur	29/Pdt.G/2022/PA.Mur
28	30/Pdt.G/2022/PA.Mur	
29	31/Pdt.G/2022/PA.Mur	
30	32/Pdt.G/2022/PA.Mur	32/Pdt.G/2022/PA.Mur
31	33/Pdt.G/2022/PA.Mur	
32	34/Pdt.G/2022/PA.Mur	34/Pdt.G/2022/PA.Mur
33	35/Pdt.G/2022/PA.Mur	
34	36/Pdt.G/2022/PA.Mur	
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>6</b>
<b>B.</b>	<b>PERMOHONAN</b>	
1	1/Pdt.P/2022/PA.Mur	1/Pdt.P/2022/PA.Mur
2	2/Pdt.P/2022/PA.Mur	2/Pdt.P/2022/PA.Mur
3	3/Pdt.P/2022/PA.Mur	3/Pdt.P/2022/PA.Mur
4	4/Pdt.P/2022/PA.Mur	4/Pdt.P/2022/PA.Mur

5	5/Pdt.P/2022/PA.Mur	5/Pdt.P/2022/PA.Mur
6	6/Pdt.P/2022/PA.Mur	6/Pdt.P/2022/PA.Mur
7	7/Pdt.P/2022/PA.Mur	7/Pdt.P/2022/PA.Mur
8	8/Pdt.P/2022/PA.Mur	8/Pdt.P/2022/PA.Mur
9	9/Pdt.P/2022/PA.Mur	9/Pdt.P/2022/PA.Mur
10	10/Pdt.P/2022/PA.Mur	10/Pdt.P/2022/PA.Mur
11	12/Pdt.P/2022/PA.Mur	12/Pdt.P/2022/PA.Mur
12	13/Pdt.P/2022/PA.Mur	13/Pdt.P/2022/PA.Mur
13	56/Pdt.P/2022/PA.Mur	56/Pdt.P/2022/PA.Mur
14	57/Pdt.P/2022/PA.Mur	57/Pdt.P/2022/PA.Mur
15	58/Pdt.P/2022/PA.Mur	58/Pdt.P/2022/PA.Mur
16	59/Pdt.P/2022/PA.Mur	59/Pdt.P/2022/PA.Mur
17	60/Pdt.P/2022/PA.Mur	60/Pdt.P/2022/PA.Mur
18	61/Pdt.P/2022/PA.Mur	61/Pdt.P/2022/PA.Mur
19	62/Pdt.P/2022/PA.Mur	62/Pdt.P/2022/PA.Mur
20	63/Pdt.P/2022/PA.Mur	63/Pdt.P/2022/PA.Mur
21	89/Pdt.P/2022/PA.Mur	89/Pdt.P/2022/PA.Mur
22	91/Pdt.P/2022/PA.Mur	91/Pdt.P/2022/PA.Mur
23	92/Pdt.P/2022/PA.Mur	92/Pdt.P/2022/PA.Mur
24	105/Pdt.P/2022/PA.Mur	105/Pdt.P/2022/PA.Mur
25	106/Pdt.P/2022/PA.Mur	106/Pdt.P/2022/PA.Mur
26	107/Pdt.P/2022/PA.Mur	107/Pdt.P/2022/PA.Mur
27	108/Pdt.P/2022/PA.Mur	108/Pdt.P/2022/PA.Mur
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

Gambar 10. Sarana dan prasarana pendukung E-Court PA. Maumere



- Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama

Untuk menjamin pelaksanaan Administrasi Pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi Pengadilan yang bersifat manual (konvensional) beralih ke administrasi pengadilan yang berbasis teknologi informasi. Pada era globalisasi saat ini suatu lembaga peradilan tanpa didukung teknologi informasi yang memadai tentu tidak akan berjalan dengan maksimal untuk memberikan pelayanan Informasi yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu maka sarana dan prasarana tersebut sangat dibutuhkan. Begitu juga sumber daya manusia yang ada harus terampil dalam mengoperasikannya. Salah satu aplikasi penunjang yang terintegrasi oleh Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan teknologi informasi adalah penerapan aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Versi 5.1.1 yang pelaksanaan update terakhir di tahun 2022. Hal ini menjadi media pendukung yang digunakan pada Pengadilan Agama Maumere dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

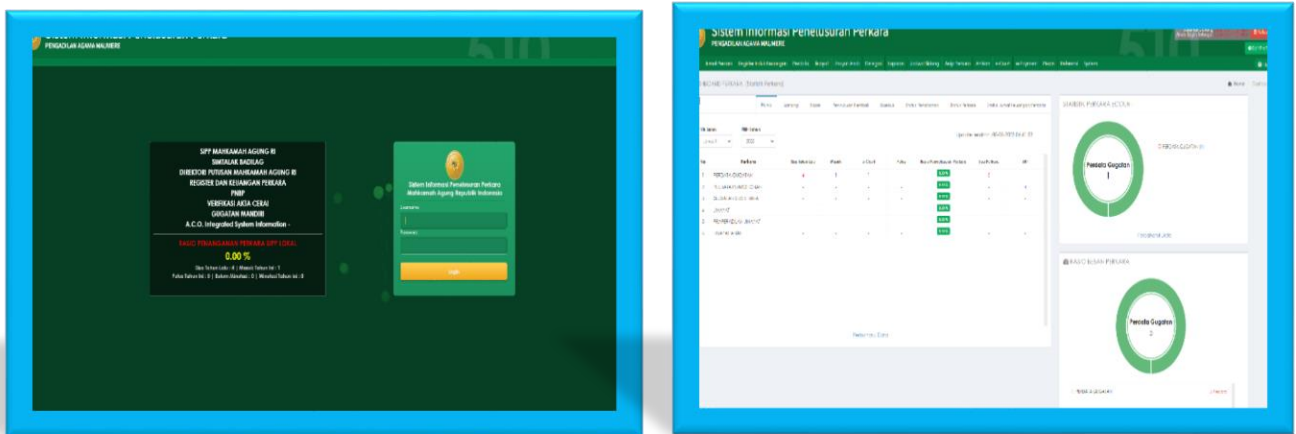
Pada tahun 2022 juga Pengadilan Agama Maumere menerima alokasi anggaran pengadaan alat pengolah data (PC) sebagai pendukung SIPP untuk Kepaniteraan yang telah di realisasikan. Alat tersebut sebagai pendukung optimalisasi SIPP yang digunakan dalam Pelayanan PTSP di Pengadilan Agama Maumere.

Sistem pelayanan yang dilakukan pada aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) antara lain sebagai berikut :

1. Pendaftaran perkara;
2. Register Perkara Gugatan dan Permohonan
3. Jurnal Keuangan Perkara Gugatan dan Permohonan
4. Pembuatan PMH;
5. Pembuatan Penunjukan PP
6. Pembuatan Penunjukan Jurusita /JSP
7. Pembuatan PHS;

8. Jadwal Sidang;
9. Relas Panggilan/Tabayun;
10. Berita Acara Sidang;
11. Penundaan Sidang;
12. Mediasi;
13. Putusan/Penetapan;
14. Pemberitahuan Putusan;
15. Minutasi. Dll.

Gambar . 11. Screenshot Aplikasi SIPP PA. Maumere Tahun 2022



Adapun perangkat keras (*hardware*) yang dimiliki Pengadilan Agama Maumere sebagai pendukung optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) saat ini adalah :

1. PC sebanyak 15 unit;
2. Laptop sebanyak 6 unit;
3. TV Monitor sebanyak 2 unit;
4. Printer sebanyak 12 unit;
5. Server sebanyak 1 unit; dan
6. Perangkat jaringan sebanyak 4 unit.

Berdasarkan hasil rapor penilaian penyelesaian perkara yang di rilis oleh Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI per 30 Desember 2022 Pengadilan Agama Maumere mendapatkan nilai capaian sebesar **100%**. Dengan

capaian tersebut Pengadilan Agama Maumere berhasil meraih peringkat 1 nasional untuk Kategori V, yaitu peradilan agama yang menangani kurang dari 250 perkara setiap tahunnya.

Semoga capaian ini senantiasa dapat dipertahankan serta tidak menurunkan semangat bagi seluruh aparaturnya terkait dalam mengoptimalkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), bahkan semoga menjadi spirit untuk dapat lebih meningkatkan kinerja sehingga mampu memberikan capaian penyelesaian perkara yang lebih baik lagi.

## BAB V

# PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

### - Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Gambar . 12. Sertifikat APM PA. Maumere



Salah satu bentuk inovasi Badan peradilan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pelaksanaan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dulunya adalah program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM).

Pada awal tahun 2022, karena adanya mutasi Hakim, dan Pejabat Struktural, maka berimplikasi pada susunan struktur Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada Pengadilan Agama Maumere. Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Maumere No. W23-A9/257/OT.01.3/SK/02/2022 tanggal

21 Februari 2022 dengan Susunan Sebagai berikut :

Tabel. 50. Susunan Tim APM Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	4	5
1	Suratnah Bao, S.Ag, M.H. 19740301 200604 2 001	Ketua	Top Manajemen
2	Fauzy Arizona, S.Sy 198806262017121003	Hakim	Ketua APM
3	Mustajib, S.H.I 196312311992031043	Panitera	Sekretaris Akreditasi
4	Jufri Endo, S.H.I	Sekretaris	Sekretaris

	197104211996031002		Akreditasi
5	Ahmad Muliadi.S.Sy 199211022017121002	Hakim Pratama	Koordinator Asesor Internal
7	Muhammad Rizki 198408162011011006	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	Koordinator Pengendali Dokumen APM
8	Sigit Apriluberta, S.H 198204262006041004	Panmud Permohonan	Sekretaris
9	Achmad Hanif, S.Kom 198504072008051001	Kasubag Umum dan Keungan	Anggota
10	M.Atsil Husnirafi, S.Kom	CPNS	Anggota
11	Abdullah, S.H., M.H 19700608.200312.1.002	Panmud Hukum	Koordinator Survey Kepuasan Masyarakat
12	Sigit Apriluberta, S.H 198204262006041004	Panmud Permohonan	Sekretaris
13	Hamzah Usman 197411022014081002	Jurusita	Anggota
14	Iman Prabowo, S.H 199706162020121007	CPNS	Anggota

Gambar 13. Foto Struktur Tim APM PA. Maumere Tahun 2022



Tantangan baru dari sebuah restorasi impelementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tidak mengikat hanya pada kelengkapan dokumen serta sarana dan

prasarana semata, tetapi hal yang menjadi mendasar adalah implementasi pelaksanaan tupoksi sesuai regulasi dan Standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, khususnya pada wilayah Pelayanan masyarakat pencari keadilan dan pelaksanaan *Job Description* masing-masing aparaturnya Pengadilan Agama Maumere.

Pada tahun 2022 berdasarkan Surat dari Ditjen Badilag Nomor 4095/DjA.3/HM.00/9/2022 tentang Perubahan Kegiatan Asesmen APM tahun 2022 dijelaskan bahwa pelaksanaan Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022 melalui telusur dokumen dan observasi implementasi tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pada tahun 2022 Ditjen Badilag tidak melaksanakan *Surveillance Eksternal*. Namun demikian, segenap Aparatur Pengadilan Agama Maumere telah menyiapkan dengan sebaik mungkin komponen-komponen untuk mendukung pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu. Selain itu, Pengadilan Agama Maumere juga telah menyelesaikan dan mengunggah *eviden-eviden* APM dalam situs <https://pmpapmzi.badilag.net/apm/>. juga telah dilaksanakan *Surveillance Internal* yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan total nilai sebesar 897,5 (dari skala 1000)

Aparatur Pengadilan Agama Maumere juga telah mewujudkan komitmen pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM), sebagaimana telah dilakukan Pencanangan Zona Integritas dan Penandatanganan Komitmen Bersama yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018. Demi memenuhi konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Maumere telah berusaha dengan segala kemampuan memenuhi baik sarana dan prasarana sebagai pendukung terlaksananya implementasi Pembangunan Zona Integritas dari 6 (enam) area yang terdiri :

i. Manajemen Perubahan (Pola pikir)

Diwujudkan dengan Peningkatan pembinaan dan evaluasi secara berjenjang bagi seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Maumere baik yang dilakukan saat pelaksanaan upacara/apel juga saat rapat berkara serta memaksimalkan fungsi dan peranan Role Model dan Agen Perubahan;

ii. Penataan Tata Laksana;

Penataan Tata Laksana diwujudkan dengan optimalisasi pelaksanaan kinerja aparatur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan *Job Description* yang telah ditetapkan serta berusaha menempatkan sumber daya aparatur sesuai dengan disiplin ilmu yang miliki sehingga menciptakan korelasidalam mewujudkan capaian kinerja yang sesuai dengan rencana strategis dan Visi Misi Pengadilan Agama Maumere.

iii. Peningkatan Kualitas SDM;

Peningkatan Kualitas SDM diwujudkan dengan mengikutsertakan aparatur dalam Diklat Penjenjangan seperti PIM IV yang telah diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Agama Maumere dan Diklat Bendahara yang telah diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Maumere, serta meningkatkan kegiatan DDTK bidang kepaniteraan seperti SIPP, E-Court, 11 (sebelas) inovasi unggulan Dirjen Badilag serta E-Litigasi Mahkamah Agung, dan Bidang Kesekretariatan yaitu DDTK aplikasi Surat dan Aplikasi Notifikasi Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat. Peningkatan kualitas SDM ini diharapkan mampu membawa perubahan dalam peningkatan kualitas pelayanan baik secara internal maupun bagi masyarakat pencari keadilan.

iv. Akuntabilitas Kinerja;

Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian yang menjadi tolak ukur dalam terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang transparan dan akuntabel, baik dalam pelayanan Informasi, Pengaduan juga terhadap akses media elektronik lainnya serta pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Maumere diwujudkan dengan tersedianya media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti Website yang selalu di update baik konten maupun berita, Banner-banner, brosur, majalah peradilan yang tersedia di ruang tunggu PTSP dan Ruang tunggu Sidang serta formulir permintaan informasi yang telah disediakan di meja PTSP pelayanan informasi, hal ini sebagai implelementasi dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

v. Pengawasan; dan

Pengawasan diwujudkan dengan pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawasan Bidang (HAWASBID) secara berkala sesuai jadwal pelaksanaan yang ditetapkan, dan juga hasil pengawasan telah disampaikan kepada seluruh pejabat terkait dan telah tindaklanjuti semua dari hasil temuan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil tindaklanjuti Hakim pengawas Bidang (HAWASBID), hal ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kinerja berjalan dengan baik.

vi. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Maumere adalah hal yang paling penting yang menjadi skala prioritas, dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Pengadilan Agama Maumere mewujudkan dengan meningkatkan fungsi dan peranan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penerimaan perkara secara elektronik (E-Court), 13 (tiga belas) Inovasi Dirjen Badilag, E-Litigasi, Pelayanan dana prodeo yang optimal dan sidang keliling bagi masyarakat kurang mampu serta Pos Layanan Hukum, dengan menerapkan prinsip pelayanan dengan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, sopan dan santun) dan 5 R (*Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin*) serta , program ini sangat memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat karena telah memberikan akses kemudahan berperkara di pengadilan Agama Maumere dengan asas Sederhana, cepat dan biaya ringan;

**Gambar 17. Foto Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM**



Gambar 18. Foto Piagam Pencanangan dan Komitmen Bersama Zona Integritas



#### - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama Maumere langsung mengambil langkah konkrit dengan mengintruksikan kepada Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Maumere untuk segera menindaklanjuti permintaan surat Dirjen Badan Peradilan Agama baik perencanaan maupun penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan Standar yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Pada bulan Januari 2019 sarana dan prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada pengadilan Agama Maumere telah selesai dibuat dan dapat digunakan untuk pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

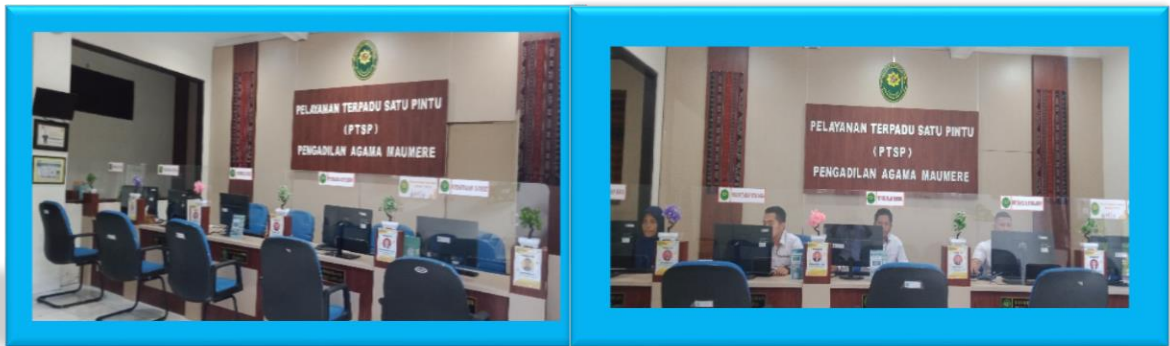
Selama tahun 2022, berdasarkan data yang telah dihimpun dalam Formulir Informasi baik secara manual maupun secara online, terdapat **313 masyarakat pencari keadilan** yang menggunakan pelayanan di PTSP. Pelayanan yang dibutuhkan antara lain mencakup konsultasi terkait kasus hukum perdata yang dialami, konsultasi terkait syarat berperkara, mendaftarkan perkara baik secara langsung maupun melalui *e-court* serta mengambil produk berupa salinan putusan dan penetapan serta akta cerai.

Salah satu hal yang menyebabkan pelayanan pada PTSP masih belum optimal karena ada dua komponen pendukung yaitu Petugas Bank BRI Cabang

Maumere dan Petugas PT. POS Cabang Maumere belum dapat tersedia dalam pelayanan PTSP di Pengadilan Agama Maumere. Hal ini menyebabkan masyarakat masih melakukan pembayaran dan Cap Pos secara manual di kantor Masing-masing. Belum tersediannya Petugas Bank BRI dan Petugas PT. Pos Indonesia dikarenakan masih menunggu kontrak Kerja yang sementara masih tahap kajian oleh masing-masing Pimpinan baik pihak Bank BRI Cabang Maumere maupun pihak PT. Pos Indonesia Cabang Maumere.

Namun dengan keterbatasan dan kekurangan komponen pendukung tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Petuags PTSP Pengadilan Agama Maumere kepada masyarakat pencari keadilan. Karena Pengadilan Agama Maumere selalu berupaya secara optimal mewujudkan pelayanan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sopan, Santun dan Sapa) dan 5 R (*Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin*) serta indah dan nyaman.

**Gambar 19. Foto Sarana dan Petugas PTSP PA. Maumere**



**- Inovasi Pelayanan Publik**

Orientasi pelayanan diartikan sebagai aktivitas organisasi yang didesain untuk menciptakan dan memberikan pelayanan prima. Orientasi pelayanan merupakan pilihan strategik untuk menyelenggarakan pelayanan prima (service excellence). Pelayanan prima tidak dapat tercapai secara alami. Sebagai Lembaga pelayan publik Pengadilan Agama Maumere berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini dipertegas dalam salah satu misi Pengadilan Agama

Maumere “*Memberikan Pelayanan Hukum Yang Prima dan Berkedailan Kepada Para pencari Keadilan*”.

Dalam mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Maumere senantiasa berusaha secara optimal melaksanakan program-program prioritas dan Inovasi Unggulan yang telah diberlakukan oleh Ditjen Badilag. Selain itu, dalam rangka menciptakan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, Pengadilan Agama Maumere berkomitmen memberikan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pengadilan Agama Maumere juga menciptakan beberapa inovasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di kantor Pengadilan Agama Maumere, Inovasi tersebut diciptakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, kreatifitas dan sinergitas aparatur Pengadilan Agama Maumere menjadi penunjang terwujudnya inovasi yang dibuat oleh Pengadilan Agama Maumere. Berikut akan dijabarkan inovasi pelayanan publik yang terdiri atas Inovasi Unggulan Ditjen Badilag, Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian serta Inovasi Internal Pengadilan Agama Maumere.

### **1. Inovasi Unggulan Ditjen Badilag**

Sejak awal tahun 2018, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) telah meluncurkan 11 (sebelas) aplikasi inovasi. Aplikasi ini telah di uji coba berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1517/DJA/HM.00/4/2022 tanggal 22 April 2020, sehingga sejak saat itu seluruh Pengadilan Agama wajib melaksanakan 11 (sebelas) aplikasi inovasi Badilag tersebut. Pada tahun 2022 telah terjadi penambahan 2 (dua) Inovasi Aplikasi yang untuk selanjutnya penggunaanya akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Aplikasi Antrian Sidang;**

Fungsi aplikasi ini adalah menyediakan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhannya. Sejak tahun 2021, aplikasi ini mengalami kendala teknis yang mana pada bagian tampilan

menu mengalami eror data. Hal ini menyebabkan pelaksanaan aplikasi ini di lingkup PTSP menjadi terkendala ;

b. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan ( A.C.O. Integrated System) ;

Fungsi aplikasi ini adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak berperkara, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak, dengan melakukan verifikasi menggunakan nomor Induk Kependudukan (NIK). Aplikasi ini pada hakikatnya telah tersedia dalam tautan website Pengadilan Agama Maumere, namun karena minimnya sosialisasi dan pembaruan (update) terhadap aplikasi ini oleh Ditjen Badilag sehingga aplikasi ini belum banyak digunakan oleh masyarakat pencari keadilan yang berperkara maupun menggunakan layanan di Pengadilan Agama Maumere.

c. Aplikasi Notifikasi Perkara

Fungsi aplikasi ini adalah memberikan notifikasi melalui sms terkait status perkara kepada para pihak yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara. Dalam implementasinya, aplikasi ini masih mengalami *error system* yang berakibat tidak dapat digunakan;

d. Aplikasi *E-Keuangan*;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai salah satu sarana validasi data keuangan perkara, pencetakan buku-buku keuangan dan saran pelaporan keuangan perkara. Pada tahun 2022, penerapan aplikasi ini sudah berjalan 100% dengan terlaksananya beberapa fitur yaitu:

- 1) Validasi Transaksi Harian
- 2) Rekap Perbandingan Harian
- 3) Rekap Perbandingan Bulanan
- 4) Laporan keuangan lainnya.

e. Aplikasi *E-Register*;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai salah satu sarana validasi data perkara baik harian maupun bulanan yang terhubung dengan Aplikasi SIPP. Selain

itu, aplikasi ini juga sebagai saran pencetakan buku-buku register sesuai pola bindalmin. Sama halnya dengan Aplikasi *E-Keuangan*, penggunaan aplikasi ini di Pengadilan Agama Maumere telah berjalan baik dengan terlaksananya validasi harian perkara maupun validasi bulanan perkara;

f. *Command Center*.

Fungsi *Command Center* adalah sebagai media komunikasi dan koordinasi instansi online serta menjadi pusat pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan *real time* dan sebagai pusat kontrol data manajemen peradilan agama sehingga mampu mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus, untuk pelaksanaan media command center pada pengadilan Agama Maumere sudah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan fungsinya.

g. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin dan sebagai salah satu bukti bahwa seseorang masuk dalam daftar penduduk miskin berdasarkan basis data terpadu dari pemerintah. Namun demikian dalam praktiknya, penggunaan aplikasi tersebut masih mengalami persoalan, yaitu data yang belum valid dikarenakan Dinas Kependudukan Kabupaten Sikka belum melakukan input data kependudukan terbaru pada Database Kependudukan Nasional;

h. Aplikasi PNBP Fungsional;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai pencatatan PNBP secara lengkap mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, juga sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetorkan PNBP fungsional ke kas Negara dalam tahun berjalan serta sebagai pengukuran kinerja Kasir dan Bendahara penerimaan. Untuk penggunaan Aplikasi telah dilaksanakan dengan efektif.

i. Aplikasi *E-Laporan*;

Fungsi aplikasi untuk proses pelaporan antar instansi pusat dan daerah dalam hal pelaporan mediator, rekapan perkara sederhana sehingga menjadi lebih cepat dan akurat. Sayangnya dalam pelaksanaannya, aplikasi ini belum dapat dioperasikan secara optimal.

j. Validasi Akta Cerai;

Fungsi Aplikasi ini adalah sebagai sarana untuk memverifikasi keaslian akta cerai yang dipegang oleh para pencari keadilan, Untuk penerapan Aplikasi Validasi Akta Cerai di Pengadilan Agama Maumere telah dijalankan dengan efektif.

k. Gugatan Mandiri;

Fungsi Aplikasi ini adalah sebagai sarana untuk memudahkan para pencari keadilan dalam pembuatan gugatan secara mandiri, baik dalam pengajuan cerai gugat, cerai talak, isbat nikah dan dispensasi nikah. Namun demikian sampai dengan saat ini fitur isbat nikah dalam gugatan mandiri tersebut sampai dengan saat ini belum dapat digunakan. Pengadilan Agama Maumere senantiasa berupaya memaksimalkan penggunaan Aplikasi Gugatan Mandiri bagi masyarakat pencari keadilan yang hendak berperkara di pengadilan. Indikator ini secara obyektif ditunjukkan melalui Penilaian Prestasi Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama setiap triwulan sekali selama tahun 2022 yang selalu mengalami trend kenaikan. Adapun capaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penilaian Triwulan I Tahun 2022 yang dirilis meraih nilai 0,36 dari skala 4
- Penilaian Triwulan II Tahun 2022 yang dirilis meraih nilai 0,57 dari skala 4
- Penilaian Triwulan III Tahun 2022 yang dirilis meraih nilai 0 karena kendala teknis
- Penilaian Triwulan IV Tahun 2022 yang dirilis meraih nilai 4 dari skala 4 (nilai maksimal)

1. CCTV Online;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai sarana kontrol kepatuhan pegawai, membangun budaya integritas serta sebagai sarana kontrol keamanan online. Sejak dikembangkan menjadi aplikasi ACO (Acces CCTV Online), Pengadilan Agama Maumere telah memperluas penggunaan CCTV Online dalam beberapa sudut ruang di Pengadilan Agama Maumere yaitu meliputi:

- 1) PTSP
- 2) Halaman Apel
- 3) *Front Desk*
- 4) Ruang Tunggu Sidang
- 5) Ruang Kepaniteraan
- 6) Ruang Kesekretariatan
- 7) Ruang Hakim
- 8) Ruang Tamu Terbuka

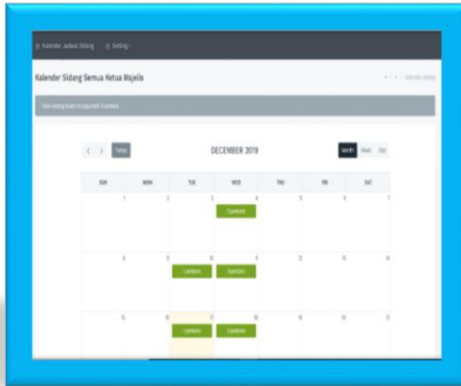
Seluruh CCTV dalam ruangan tersebut senantiasa dalam kondisi aktif serta dapat diakses secara online. Sehingga dalam Penilaian Prestasi Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama setiap triwulan sekali selama tahun 2022, Pengadilan Agama Maumere senantiasa memperoleh nilai 3 (skala 3) atau nilai maksimal baik dari triwulan I, II, III dan IV.

m. Vision Online;

Fungsi Aplikasi ini adalah sebagai Pelayanan Perizinan Pegawai Peradilan Agama secara online. Selama tahun 2022 salah satu Hakim Pengadilan Agama Maumere yaitu YM. Ahmad Muliadi, S.Sy telah mencoba dan menerapkan aplikasi ini untuk penerapan izin kuliah;

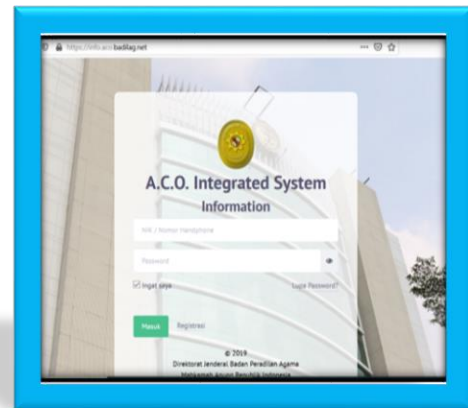
Dari 13 (tiga belas) aplikasi inovasi Badilag tersebut hampir seluruhnya telah di implementasikan di Pengadilan Agama Maumere, walaupun ada beberapa aplikasi yang masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat lebih optimal implementasi aplikasi tersebut dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Maumere telah melaporkan kepada Direktur

Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Pengadilan Tinggi Agama Kupang tentang implementasi 13 (tigabelas) aplikasi inovasi Badan Peradilan Agama.

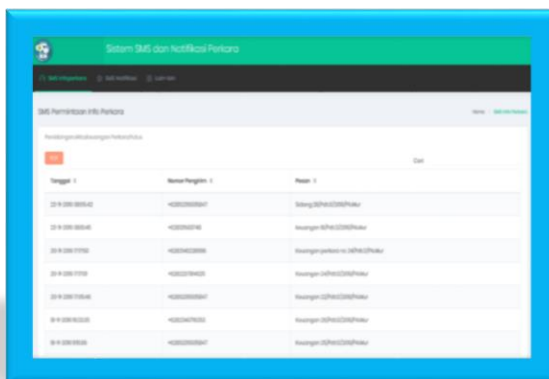


Gambar 20. Tampilan Aplikasi Antrian Sidang PA. Maumere

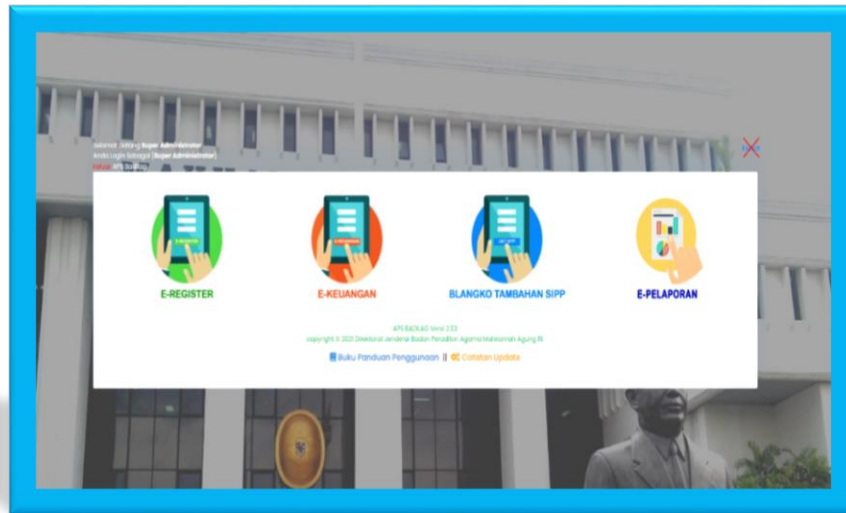
Gambar 21. Tampilan Aplikasi Informasi Produk Pengadilan PA. Maumere



Gambar 22. Tampilan Aplikasi Notifikasi Perkara PA. Maumere



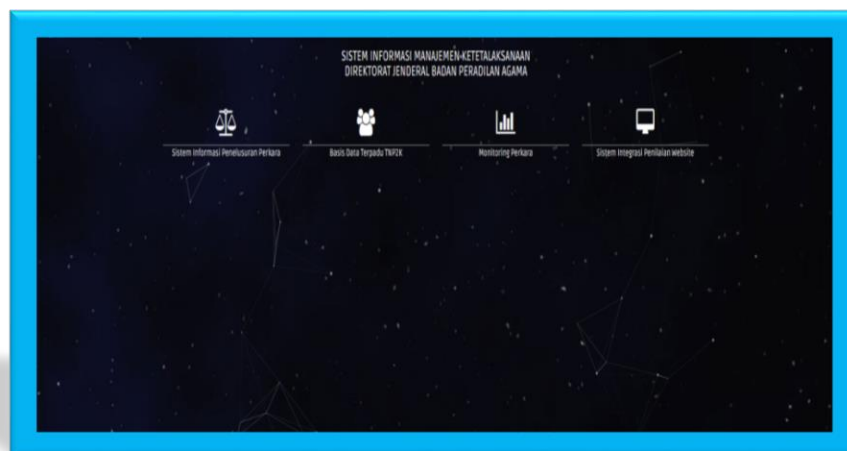
Gambar 23. Tampilan Aplikasi E-Register dan E-Keunagan PA. Maumere



Gambar 24. Tampilan Aplikasi PNBP Fungsional PA. Maumere



Gambar 25. Tampilan Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan PA. Maumere



Gambar 26. Tampilan Aplikasi Command Center PA. Maumere



APLIKASI PENGAMBILAN DAN LEGALISASI AKTA CERAI

Profil AC

Peraturan nomor AC/Nomor penastikah di atas:

Nomor AC	Tanggal AC	Nomor Ser AC	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Klasifikasi	Tanggal Putus	Tanggal Berakhir	Tanggal BHK	Tanggal dandef	Tanggal dandef T	Kategori
000AC 2020/mau	08-09-2020	10101	30/Perd 2020/mau	Cera/Talak	Jumlah di atas	08-09-2020	08-09-2020	08-09-2020	08-09-2020	08-09-2020	...

...

Gambar 27. Tampilan Aplikasi Validasi Akta Cerai PA. Maumere

Gugatan / Permohonan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Dirjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Permohonan Gugatan / Permohonan secara mandiri.

Sudah Siapkah Anda?

Persiapkan Persyaratan, Data dan Informasi diri anda untuk memulai membuat Gugatan / Permohonan Secara Mandiri. Ikuti setiap langkah yang akan disediakan oleh sistem.

PROSEDUR BERPERKARA

MULAI

Gambar 28. Tampilan Aplikasi Gugatan Mandiri PA. Maumere

Gambar 29. Tampilan Aplikasi CCTV Online PA. Maumere



Gambar 30. Tampilan Aplikasi Vision Online PA. Maumere

## 2. Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Pada tanggal 18 Juni 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI melalui surat bernomor 1960/ DjA/ HK.00 / 6 / 2021 meminta kepada setiap pengadilan agama agar memberikan perhatian atas ‘Jaminan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian’. Adapun secara garis besar kerangka kebijakan tersebut meliputi:

- a. Memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam media informasi pengadilan;

- b. Memastikan PTSP memberikan pelayanan dan informasi yang diperlukan terhadap para pihak berperkara (khususnya terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selain itu Posbakum, juga diminta memaksimalkan layanan pemerbian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang berlaku;
- c. Menyediakan template surat gugatan yang mencantumkan tuntutan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
- d. Hakim dapat mempedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
- e. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalkannya isi putusan pengadilan yang memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Dalam rangka pemenuhan terhadap program prioritas tersebut, Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan sejumlah langkah yaitu:

**a) Ketersediaan Informasi Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Pada Media Informasi Pengadilan Agama Maumere**

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Maumere secara optimal telah berupaya memastikan informasi mengenai jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian tersedia pada media informasi Pengadilan Agama Maumere. Hal ini ditunjukkan dengan telah tersedianya brosur cetak terkait informasi tersebut pada PTSP, pemutaran secara berulang video



penjelasan mengenai jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilag pada PTSP beserta unggahan informasi pada berbagai media sosial Pengadilan Agama Maumere seperti *instagram*,

*facebook dan youtube*. Bahkan pada akhir Desember 2022 yang lalu Pengadilan Agama Maumere telah merilis video terkait ‘Jaminan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian’ yang telah dialih bahasa menjadi bahasa daerah setempat yaitu Bahasa Maumere dan Bahasa Bajo.

**b) Briefing Posbakum dan Petugas PTSP terkait Jaminan Pemenuhan Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian**

Pengadilan Agama Maumere secara proaktif melaksanakan kegiatan *Briefing* PTSP yang dilaksanakan setiap hari rabu pagi setiap minggunya. Kegiatan tersebut diikuti oleh Petugas PTSP dan Posbakum. Dalam pembahasannya Pembina *Briefing* senantiasa mengingatkan kepada



segenap Petugas PTSP dan Petugas Posbakum agar memberikan pelayanan dan informasi terkait jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

**c) Surat Gugatan yang telah mencantumkan Pemenuhan Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian**

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Maumere menerima 36 perkara gugatan, 18 perkara diantaranya merupakan cerai gugat. Dari 18 gugatan tersebut, 9 perkara diantaranya dalam surat gugatan telah dicantumkan petitum terkait tuntutan hak – hak seperti nafkah *mut'ah*, *iddah*, *madliyah* dan nafkah pemeliharaan anak. Adapun 9 perkara sisanya tidak mencantumkan tuntutan hak dalam surat gugatan. Faktor ini disebabkan karena meskipun para pihak telah menerima informasi mengenai hak-haknya pasca perceraian, namun para pihak tetap enggan mengajukanya dalam surat gugatan. Terdapat beberapa alasan yang mendasari hal tersebut:

- 1) Pihak dan keluarga besarnya merasa gengsi untuk meminta sejumlah uang kepada suaminya

- 2) Pihak telah menyadari bahwa suaminya tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi tuntutan hak tersebut.

**d) Putusan Hakim yang telah menjamin terpenuhinya Pemenuhan Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian**

Selama tahun 2022, Pengadilan Agama Maumere telah menerima 36 perkara gugatan. Dari 36 perkara tersebut, 16 perkara diantaranya merupakan perkara cerai talak, sedangkan 18 perkara merupakan cerai gugat. Dari jumlah perkara cerai talak tersebut, 3 putusan diantaranya telah menghukum mantan suami untuk membayar sejumlah nafkah dan hak-hak lainnya kepada mantan istrinya. Sedangkan untuk perkara cerai gugat, terdapat 6 putusan yang telah menghukum mantan suami untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar hak-hak sebagaimana tuntutan dari mantan istri.

Secara lebih detail, akan dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel Rekapitulasi Perkara Cerai Talak Tahun 2022**

No	No Perkara	Tuntutan Nafkah Perempuan (Iddah, Mut'ah, Madyah)	Tuntutan Nafkah Anak	Putusan Nafkah	Keterangan
1.	1/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Tidak ada putusan nafkah
2.	5/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Tidak ada putusan nafkah
3.	6/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Tidak ada putusan nafkah
4.	8/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Putusan Verstek
5.	10/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Putusan Verstek & Tidak ada putusan nafkah
6.	16/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Tidak ada putusan nafkah
7.	18/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Perkara dicabut
8.	21/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Perkara dicabut
9.	23/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Perkara dicabut
10.	27/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	-
11.	28/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Tidak ada putusan nafkah

12.	29/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	2.000.0000 (Nafkah Mutah)	Sudah dipenuhi (Pemohon telah mengambil akta cerai)
13.	30/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Perkara belum diputus
14.	32/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	500.000 (Nafkah Iddah) 500.000 (Nafkah Mutah)	Sudah dipenuhi (Pemohon telah mengambil akta cerai)
15.	34/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	3000.000 (Nafkah Iddah) 3 gram emas (Nafkah Mutah) 2.000.000/ bulan (Nafkah Anak)	Pemohon dan Termohon belum mengambil akta cerai
16.	36/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	Belum putusan	Belum putusan

**Tabel Rekapitulasi Perkara Cerai Gugat Tahun 2022**

No	No Perkara	Tuntutan Nafkah Perempuan (Iddah, Mut'ah, Madyah)	Tuntutan Nafkah Anak (Hadanah)	Putusan Nafkah	Keterangan
1.	2/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah
2.	3/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	2.000.000/ bulan	-	Putusan Verstek
3.	4/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Putusan Verstek & Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah
4.	7/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Putusan Verstek & Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah

5.	11/Pdt.G/2022/PA.Mur	3.500.000	-	3.500.000	Sudah dipenuhi
6.	12/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	2.000.000/ bulan	2.000.000/ bulan	Sudah dipenuhi
7.	13/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Putusan Verstek & Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah
8.	14/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah
9.	15/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Putusan Gugur & Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah
10.	17/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Putusan Verstek & Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah
11.	19/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	2.500.000/ bulan	1.000.000/ bulan	Sudah dipenuhi
12.	22/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	1.500.000/ bulan	1.500.000/ bulan	Sudah dipenuhi
13.	24/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Putusan Verstek & Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah
14.	25/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Putusan Verstek & Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah
15.	26/Pdt.G/2022/PA.Mur	-	-	-	Putusan Verstek & Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah
16.	31/Pdt.G/2022/PA.Mur	1.500.000	500.000/ bulan	900.000 (Nafkah Iddah) 500.000/ bulan (Nafkah Anak)	Sudah dipenuhi
17.	33/Pdt.G/2022/PA.Mur	1.500.000	1.000.000/ bulan	-	Putusan Verstek & Tuntutan Nafkah tidak dikabulkan
18.	35/Pdt.G/2022/PA.Mur	1.500.000 (Nafkah Iddah)	500.000	500.000/ bulan (Nafkah Anak)	Belum dipenuhi karena Tergugat belum mengambil akta cerai

### C. Inovasi Pengadilan Agama Maumere

#### a. Diskusi Masalah Kepaniteraan, Yustisial dan Bedah Berkas

Pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan modal utama bagi aparaturnya kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Terhitung sejak pendaftaran perkara sampai dengan penyerahan produk hukum kepada para pencari keadilan harus dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku agar pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.



48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan agar pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai. Sayangnya peraturan perundang-undangan yang ada terkadang kurang jelas dan lengkap pengaturannya, sehingga seringkali menimbulkan multitafsir antara satu pihak dan pihak lain dalam menafsirkan peraturan terkait, hal ini sesuai dengan postulat yang berbunyi *het recht hink achter de feiten aan* yang berarti hukum selalu tertinggal dengan peristiwanya. Atas dasar hal itu, untuk mengatasi hambatan tersebut tentunya membutuhkan penafsiran yang mendalam dan pemahaman yang sama dari aparaturnya Pengadilan Agama Maumere terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada para pencari keadilan sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat tercapai.

Atas dasar tersebut, untuk menyamakan pemikiran dan menghindari penafsiran yang berbeda terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku aparaturnya di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere terkait dengan tahapan pendaftaran sampai dengan penyerahan produk hukum Pengadilan Agama Maumere baik dari petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sampai dengan yang mulia hakim yang akan memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang difaftarkan di Pengadilan Agama Maumere, maka diperlukan kegiatan “DISKUSI MASALAH KEPANITERAAN, YUSTISIAL DAN BEDAH BERKAS” guna memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan sebagaimana dimuat dalam misi ke-2 Pengadilan Agama Maumere.

b. **Halo PTSP+ Pengadilan Agama Maumere**

**Halo PTSP+ Pengadilan Agama Maumere** adalah fitur penunjang yang dikembangkan dalam rangka memberikan kemudahan akses serta efisiensi bagi Masyarakat Pencari Keadilan dalam menjangkau layanan yang ada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Fitur ini sangat diperlukan mengingat secara geografis wilayah kabupaten Sikka, sebagai kompetensi relatif Pengadilan Agama Maumere terlampaui luas meliputi 7.553,24 Km<sup>2</sup> wilayah daratan dan terdiri atas pulau-pulau yaitu sebanyak 18 buah. Dengan jumlah kecamatan mencapai 21 kecamatan, 13 kelurahan, dan 147 desa diikuti jumlah penduduknya mencapai 314.809 jiwa, **Halo PTSP+** diharapkan dapat meminimalisir mobilitas masyarakat tanpa mengurangi haknya untuk memperoleh akses terhadap hukum dan keadilan. Langkah ini sejalan dengan prinsip utama dalam proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Fitur ini dikembangkan oleh Analis Perkara Peradilan PA Maumere, Imam Prabowo, S.H.

Terdapat beberapa fitur unggulan yang terkandung dalam **Halo PTSP+ Pengadilan Agama Maumere** yaitu:

1. **Konsultasi Online PTSP**

Fitur **Konsultasi Online PTSP** memungkinkan masyarakat pencari keadilan melakukan konsultasi terkait persyaratan pendaftaran perkara maupun panjar biaya perkara secara online, baik melalui *chat* maupun melalui *video call*. Pengguna hanya cukup meng-klik tautan lalu mengisi formulir yang disediakan, maka notifikasi pengisian formulir tersebut akan langsung diterima oleh PTSP Pengadilan Agama Maumere. Pihak akan langsung dihubungi baik melalui chat maupun melalui video call terkait permasalahan atau kendala yang dihadapi seputar pendaftaran perkara.

## 2. **Pengambilan Produk Pengadilan**

Fitur **Pengambilan Produk Pengadilan** merupakan fitur yang digunakan untuk mempermudah masyarakat mengambil produk-produk pengadilan seperti salinan penetapan atau akta cerai. Masyarakat yang hendak mengambil atau mengecek ketersediaan produk-produk pengadilan tidak perlu datang ke kantor melainkan cukup diakses secara online saja dengan mengupload syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kedepan, pengambilan produk pengadilan akan dikembangkan melalui *delivery order* yaitu langsung diantar ke rumah masyarakat pencari keadilan secara langsung.

## 3. **Konsultasi Online Posbakum**

Fitur **Konsultasi Online Posbakum** memungkinkan masyarakat pencari keadilan melakukan konsultasi terkait masalah hukum maupun rencana mendaftarkan perkara melalui *video call*. Bahkan dimungkinkan para pihak membuat surat gugatan secara online sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mendaftar perkara di pengadilan hanya berlangsung singkat. Pengguna hanya cukup meng-klik tautan lalu mengisi formulir yang disediakan, maka notifikasi pengisian formulir tersebut akan langsung diterima oleh PTSP Pengadilan Agama Maumere. Pihak akan langsung dihubungi baik melalui video oleh petugas Posbakum.

## 4. **Buku Saku Elektronik.**

Fitur **Buku Saku Elektronik** dikembangkan untuk memudahkan pihak memahami seputar peradilan agama. Saat ini terdapat 2 serial yang telah dibuat **Buku Saku Elektronik** meliputi Hukum Kewarisan Islam dan Teknik Mudah Membuat Gugatan dan Permohonan.

c. **Hakim PA Maumere Goes To School**

Pasca di *launching* bersama bersama siswa – siswi SMKN 3 Maumere pada hari Kamis 20 Januari 2022 yang lalu, Pengadilan Agama Maumere (PA Maumere) melanjutkan kegiatan *Hakim Goes To School* untuk kedua kalinya pada hari Rabu, 9 Maret 2022 bertempat di Aula Madrasah Aliyah Muhammadiyah Nangahure, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka.

Pada kesempatan kali ini, 2 (dua) Hakim PA Maumere, YM. Fauzy Arizona, S.Sy dan YM. Ahmad Muliadi, S.Sy bertindak sebagai pengisi



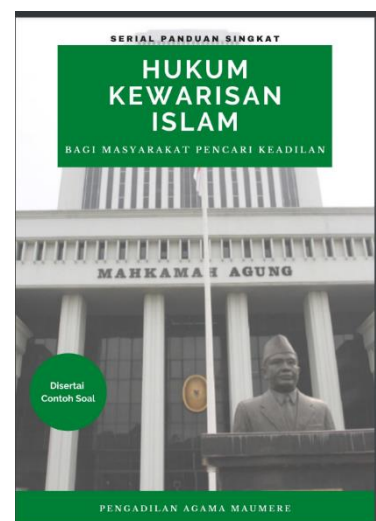
materi pada kegiatan yang dihadiri oleh seluruh siswa-siswi yang duduk di bangku Kelas 10, 11 dan 12 serta perwakilan pengurus IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah). Acara dibuka dan diawali dengan mendengarkan pengantar yang disampaikan oleh YM. Fauzy. Dalam sambutannya, selain sedikit memaparkan terkait ruang lingkup peradilan agama, YM Fauzy juga memotivasi dan mengobarkan semangat juang pada siswa-siswi untuk bertekad meraih cita-citanya.

Setelah dibuka oleh YM. Fauzy, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh YM. Ahmad Muliadi, S.Sy. Dalam pemaparannya YM. Muliadi menjelaskan secara rinci mengenalkan seputar Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya termasuk secara khusus peradilan agama. Selanjutnya, YM. Muliadi juga memotivasi kepada seluruh peserta agar bersemangat dalam melanjutkan pendidikannya hingga mencapai perguruan tinggi, karena

pendidikan merupakan investasi utama untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. “Pendidikan merupakan sebuah senjata paling mematikan di dunia, krena dengan pendidikan, anda dapat mudah mengubah dunia” ucap YM Muliadi mengutip ucapan dari Nelson Mandela. Acara yang dimoderatori oleh Analis Perkara Peradilan, Imam Prabowo, S.H. ini juga diisi dengan pengenalan profesi hakim berikut dengan segala keuntungan-keuntungannya agar para peserta tertarik untuk melanjutkan cita-citanya menjadi seorang hakim. Para siswa-siswi nampak antusias mendengarkan pemaparan kegiatan Hakim Goes To School yang diberikan. Untuk melepas kepenatan sejenak, dilakukan *games* dan *quiz* dengan doorprize dan hadiah menarik yang dipandu oleh Imam Prabowo. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan foto bersama. Kegiatan Hakim Goes To School sebagai bagian dari inovasi yang PA Maumere akan terus dikembangkan untuk menjangkau masyarakat pencari keadilan, khususnya di lingkup sekolah dan perguruan tinggi.

d. **Buku Saku Elektronik**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Pemilihan buku sebagai salah satu inovasi Pengadilan Agama Maumere mendasarkan pada beberapa alasan. Pertama, buku menjadi sarana bagi para pihak dalam meningkatkan aktivitas literasi. Terlebih di NTT, aktivitas tersebut tergolong masih cukup rendah. Kedua, secara filosofis buku memiliki nilai akademis dan ilmiah, sehingga substansi di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini akan disusun secara komprehensif dan sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan juga dapat menjadi pegangan bagi aparaturnya yang sedang menjalankan tugas.



Selain itu yang menjadi keunggulan adalah buku ini dapat diakses secara elektronik oleh masyarakat pencari keadilan, dimana saja dan kapan saja. Masyarakat yang menginginkan buku ini cukup melakukan scan pada *QR Code* yang telah tersedia baik di PTSP Pengadilan Agama Maumere, maupun di media sosialnya. Beberapa serial dalam buku ini meliputi: a. Serial Panduan Singkat “Hukum Kewarisan Islam” b. Serial Panduan Singkat “Teknik Mudah Membuat Gugatan dan Permohonan” c. Serial Panduan Syarat Berperkara di Pengadilan

e. **PTSP Keliling**

Program PTSP Keliling ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses terhadap pelayanan peradilan seperti: konsultasi terkait permasalahan hukum, permohonan informasi, pendaftaran perkara, serta pengambilan produk pengadilan. Program PTSP Keliling mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Maumere (PA Maumere) diluar kantor PA Maumere. Sejak dirilis pada pertengahan tahun 2021 yang lalu, PTSP



Keliling telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing ada di MIS Wuring, Kecamatan Wolomarang bersamaan dengan kegiatan Sidang Keliling dan Pelayanan Terpadu Tahun 2021, pada saat pelaksanaan Hakim Goes To School pada tanggal 9 Maret 2022, serta di Pulau Parumaan pada tanggal 12 Maret 2022.

f. **Buku Tamu Elektronik**

Buku Tamu Elektronik adalah inovasi aplikasi yang dibuat oleh Pengadilan Agama Maumere untuk mencatat setiap tamu yang datang mengunjungi Pengadilan Agama Maumere. Tamu yang datang cukup menulis

identitasnya melalui gadget yang tersedia di bagian resepsionis yang diikuti dengan selfie, sehingga tercatat sebagai tamu di Pengadilan Agama Maumere.

g. **Photoboth SI BONA**

Pada saat pelaksanaan Sidang Keliling dan Terpadu beberapa waktu yang lalu, dibuat inovasi Photobooth SIBONA. Photobooth SIBONA merupakan salah satu sarana yang disediakan pada pelaksanaan Sidang



Keliling dan Pelayanan Terpadu Tahun 2021. Fasilitas ini diberikan selain untuk mengabadikan momen pengesahan perkawinan diantara mereka juga dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat agar melakukan pencatatan perkawinan melalui KUA setempat. Dalam Photobooth tersedia berbagai kata-kata edukatif yang dapat dibawa oleh masyarakat saat berfoto.

h. **Administrasi Panjar Biaya Perkara secara Elektronik (APBP)**

Administrasi Panjar Biaya Perkara (APBP) adalah inovasi yang dibuat oleh Pengadilan Agama Maumere untuk memudahkan Petugas PTSP dalam memperoleh informasi yang valid dan tepat mengenai taksiran panjar biaya perkara. Dengan adanya APBP ini, maka pihak yang akan mendaftarkan perkara dapat mengetahui lebih awal panjar biaya perkara yang wajib dibayarkan untuk dapat mendaftarkan perkara, sehingga memudahkan pihak yang bersangkutan untuk mempersiapkan uang untuk mendaftarkan perkaranya.

i. **E – Panggawang**

Panggawang dalam bahasa lokal di Kabupaten Sikka artinya adalah terima kasih. E-Panggawang merupakan pengumuman elektronik yang ditampilkan di laman media sosial Pengadilan Agama Maumere untuk

mendukung kelancaran proses perkara. Inovasi ini dibuat sebagai langkah dalam menghadapi perkembangan zaman dengan pendekatan teknologi. Selain itu hal ini sesuai dengan paradigma pelayanan publik yang berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penggunaan aplikasi e- Panggawang ini bertujuan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sebagai contoh adalah sebagai berikut: pengumuman penetapan itsbat nikah, selain ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan sesuai hukum acara, juga dapat disiarkan melalui Aplikasi E-Panggawang selama 14 hari sejak dibacakannya penetapan itsbat nikah untuk mengetahui apakah ada pihak yang berkeberatan atas penetapan itsbat nikah tersebut atau tidak.

j. **Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dini**

Tercatat setelah diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengubah batas usia minimal perkawinan untuk calon mempelai perempuan menjadi 19 tahun, terdapat 25 permohonan dispensasi kawin di PA Maumere. Angka permohonan dispensasi kawin tersebut termasuk kategori tinggi jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk yang bergama Islam di Kabupaten Sikka yaitu sejumlah 37.720 penduduk. Tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Sikka tersebut mendorong Pengadilan Agama Maumere untuk menciptakan inovasi berupa kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini sebagai upaya preventif untuk mencegah adanya pernikahan dini di Kabupaten Sikka. Dalam kegiatan tersebut segenap aparatur Pengadilan Agama Maumere memberikan edukasi terhadap dampak negatif pergaulan bebas dan pernikahan dini serta mendorong peserta sosialisasi yang merupakan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi.

k. **E-Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara**

E- Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara merupakan inovasi yang diluncurkan oleh PA Maumere yang terdiri brosur persyaratan pendaftaran

perkara untuk setiap jenis perkaranya serta dilengkapi dengan video animasi persyaratan pendaftaran perkara sehingga diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat kelompok rentan yang terdiri dari wanita hamil, lansia dan kelompok disabilitas.

Aplikasi ini disusun untuk mengakomodir wilayah yurisdiksi PA Maumere yang terdiri dari wilayah kepulauan sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi persyaratan pendaftaran perkara tidak perlu datang langsung ke PA Maumere untuk menanyakan persyaratan pendaftaran perkara namun cukup mengakses informasi melalui e-Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Halo PTSP+ PA Maumere yang merupakan inovasi PA Maumere sebelumnya.

Selain itu aplikasi ini juga sudah dapat diakses dengan cara scan QR Code e-Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara yang sudah tersedia di PTSP PA Maumere telah disosialisasikan di media social PA Maumere seperti instagram, facebook, youtube dll.

#### 1. PAMUR FC

*Men Sana In Corpore Sano*, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dalam rangka mendorong kualitas pelaksanaan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maka dibutuhkan ASN yang sehat secara jasmani dan rohani. Sebagai upaya untuk menjaga kesehatan segenap aparatur PA Maumere, maka PA Maumere meluncurkan kegiatan futsal mingguan yang dilaksanakan setiap hari Rabu malam. Kegiatan yang dinamakan PA Maumere Futsal Club (PAMUR FC) ini selain bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh segenap aparatur PA Maumere juga bertujuan untuk meningkatkan kekompakan antar aparatur PA Maumere sehingga tercipta kerjasama yang harmonis dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

#### m. Formulir Permohonan Informasi Elektronik Prosedur Biasa dan Khusus Ramah Disabilitas

Formulir Permohonan informasi elektronik ramah disabilitas sebagai tindak lanjut prosedur pelayanan informasi di Pengadilan berdasarkan SK KMA No 1-114/SK/KMA/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan, Terobosan inovasi ini sebagai tindak lanjut pengembangan sekaligus penyelesaian problematika yang selama ini terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Maumere.

Berdasarkan SK KMA tersebut setiap pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan, yakni formulir Model A prosedur biasa untuk yang mengajukan permohonan informasi secara tidak langsung dan formulir Model B Prosedur Khusus untuk yang mengajukan permohonan informasi secara langsung. Namun belum adanya formulir Model A prosedur biasa yang dapat diakses masyarakat secara langsung tanpa mendatangi kantor Pengadilan menjadi kendala dalam pelaksanaan prosedur ini.

Untuk itu dengan adanya inovasi Formulir Permohonan Informasi Elektronik Prosedur Biasa dan Khusus Ramah Disabilitas di Pengadilan Agama Maumere dapat mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi di Pengadilan Agama Maumere kapan saja dan dimana saja tanpa perlu datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Maumere, hal ini dapat meminimalisir biaya, waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan oleh masyarakat mengingat terdapat beberapa wilayah kepulauan yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere yang memerlukan biaya yang relatif mahal untuk sewa perahu sebagai transportasi datang ke kantor Pengadilan Agama Maumere. Selain itu formulir ini dilengkapi petunjuk pengisian bagi masyarakat penyandang disabilitas yang mana di formulir manual sebelumnya tidak dapat diakses oleh masyarakat penyandang disabilitas. Formulir ini mulai efektif berlaku di Pengadilan Agama Maumere sejak Hari Senin tanggal 7 November 2022 Hal ini juga sebagai komitmen dalam mewujudkan salah satu misi Pengadilan Agama

Maumere yakni Memberikan pelayanan prima dan berkeadilan kepada para pencari keadilan.

n. **PIKHACU**

PIKHACU merupakan akronim dari Aplikasi Permohonan Cuti. Aplikasi ini merupakan perwujudan permohonan cuti pegawai di Pengadilan Agama Maumere secara digital sebagai salah satu bentuk penerapan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Permenpan & RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penggunaan PIKHACU ini bertujuan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik internal (pegawai) Pengadilan Agama Maumere apabila ada permohonan cuti dari setiap aparatur Pengadilan Agama Maumere.

o. **Lemari Kompensasi**

Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan merupakan *core business* dari instansi pemerintah seperti Pengadilan Agama Maumere. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku sebagaimana diatur di SOP yang sudah ditentukan. Sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, PA Maumere meluncurkan inovasi Lemari Kompensasi yang berisi barang-barang kompensasi apabila terjadi keterlambatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan SOP yang berlaku.

p. **Alarm Peningat Presensi**

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan seluruh aparatur PA Maumere pada saat melakukan presensi kedatangan, istirahat, selesai istirahat, dan kepulangan, maka PA Maumere meluncurkan aplikasi Alarm Peningat Presensi untuk mencegah segenap aparatur PA Maumere dari kelupaan dalam melakukan presensi online baik di aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI dan presensi PTA Kupang.

## BAB VI

## PENGAWASAN

**A. Internal**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dalam menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas pokok dan fungsi dapat dijalankan sesuai rencana strategis serta aturan yang berlaku. Dalam hal Pengawasan Pengadilan Agama Maumere telah berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, dan KMA Nomor: 145/KMA/SK/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007. Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan kegiatan dimaksud, dimana dalam pelaksanaan Pengawasan tersebut yang menjadi Koordinator Pengawas adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere, dengan mengkoordinir seluruh Hakim yang menjadi Pengawas Bidang.

Inti dari sebuah pengawasan adalah pengendalian dimana pengendalian tersebut juga terdiri dari 2 (dua) aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Sehingga pengawasan harus dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh agar mampu menciptakan organisasi yang baik dan berkesinambungan.

**1. Pengawasan Melekat**

Dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan refresif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien. Pada Pengadilan Agama Maumere, pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere secara berkala mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari. Demikian juga pengawasan dilakukan melalui rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung, maka yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan membina Hakim dan PNS dalam satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal, Ketua Pengadilan Agama Maumere telah menunjuk Hakim pengawas bidang yang

bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap triwulan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Untuk lebih menguatkan peranan dan fungsi Pembinaan serta Pengawasan Bidang Ketua Pengadilan Agama Maumere telah membuat sebuah regulasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W23-A9/261/KP.00.3/SK/2/2022 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022 yang susunannya sebagai berikut:

Tabel . 51. Susunan Tim Hawasbid PA. Maumere

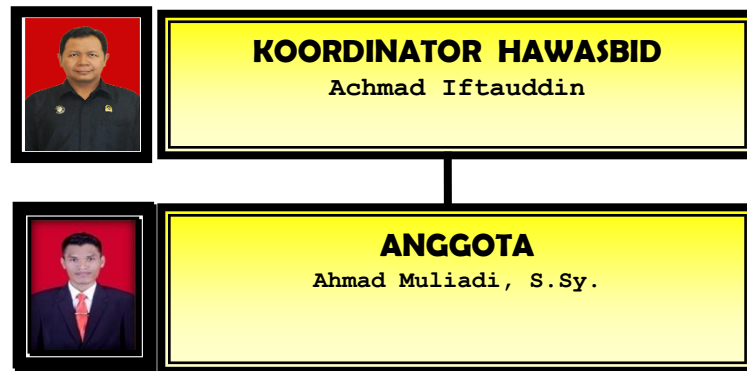
NO	NAMA, NIP PANGKAT, GOLONGAN	JABATAN		KET
		DINAS	HAKIM PENGAWAS BIDANG	
1.	<b>Suratnah Bao, S.Ag., M.H.</b> 19740301 200604 2 001 Pembina, IV/a	Ketua /Hakim MadyaPratama	➤ Penasehat/Koor dinator Pengawasan	
2.	<b>Fauzy Arizona, S.Sy</b> 19880626.201712.1.003 PenataMuda, III/a	Hakim Pratama	➤ Pengawas Bidang Kesekretariatan dan Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik	
3.	<b>Ahmad Muliadi, S.Sy.</b> 19921102.201712.1.002 PenataMuda, III/	Hakim Pratama Madya	➤ Pengawas Bidang Kepaniteraan (Administrasi persidangan, administrasi perkara, dan keungan perkara)	

Kemudian karena adanya promosi dan mutasi Hakim Pengadilan Agama Maumere sehingga perlu dilaksanakan pembaharuan Susunan ataupun komposisi Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022 sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor: W23-A9/872/KP.00.3/SK/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Revisi Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022 yang susunannya adalah sebagai berikut :

**Tabel . 52. Susunan Revisi Tim Hawasbid PA. Maumere**

NO	NAMA, NIP PANGKAT, GOLONGAN	JABATAN	
		DINAS	HAKIM PENGAWAS BIDANG
1.	<b>Achmad Iftauddin, S.Ag</b> 197505112009121001 Penata Tingkat I, III/d	Wakil Ketua	Koordinator Merangkap Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan, Kinerja, Pelayanan Publik dan Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum dan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Ortala dan Administrasi Perencanaan, TI dan Pelaporan)
2.	<b>Ahmad Muliadi, S.Sy.</b> 19921102.201712.1.002 PenataMuda, III/a	Hakim Pratama	Pengawas Bidang Kepaniteraan ( Administrasi persidangan, administrasi perkara dan keungan Perkara)

Tabel. 31. Bagan Tim Hawasbid PA. Maumere Tahun 2022



Pelaksanaan Pengawasan yang telah berjalan di Pengadilan Agama Maumere telah secara rutin/reguler sesuai dengan jadwal pengawasan yang berikan kepada masing-masing bidang.

Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dikoordinatori oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere sebagai penanggung jawab tugas-tugas yang dilaksanakan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Maumere dapat mempelajari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja Aparatur Peradilan yang dipimpinnya.

Adapun selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2022, pada Pengadilan Agama Maumere telah dilakukan Pengawasan dan Pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidang selama 4 (empat) periode dan Hasil Pengawasan Hakim Pengawasan Bidang telah ditindaklanjuti seluruhnya pejabat terkait baik melalui laporan hasil tindaklanjut maupun dengan pelaksanaan yang membutuhkan *action* ataupun tindakan perubahan yang sifatnya segera semua telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta arahan dari Hakim Pengawas Bidang.



Gambar 32. Laporan Hasil Pengawasan Bidang



Gambar. 33. Laporan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Bidang

## 2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh pihak yang memahami substansi kerja objek yang diawasi dan ditunjuk khusus untuk melakukan audit independen terhadap objek yang diawasi, dalam hal ini pengawasan fungsional Pengadilan Agama Maumere dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Badan Pengawasan (Bawas) dari Mahkamah Agung RI selaku atasan langsung. Pemeriksaan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Maumere dalam tertib administrasi, organisasi finansial Peradilan, terselenggaranya manajemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pemeriksaan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Maumere bisa diukur dari hasil pemeriksaan tersebut dan hasilnya baik walaupun tentunya belum sempurna karena masih ada beberapa yang perlu adanya sedikit perbaikan dan pembaharuan, namun sebagai catatan diharapkan kedepan akan lebih disempurnakan sehingga mampu memenuhi target dan capaian yang diinginkan sesuai dengan Rencana Strategis dan Program Kerja yang telah ditetapkan.

**B. Evaluasi**

Untuk melihat hasil kinerja apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan maka dibutuhkan sebuah evaluasi yang progresif. Evaluasi hasil pengawasan dimaksudkan untuk melakukan tindakan perbaikan sistem manajemen maupun tata kelola serta pencegahan terhadap pelaksanaan kinerja yang tidak atau belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang secara periodik telah dilaksanakan dengan baik setiap triwulan (tiga bulan) sekali, hal ini disesuaikan dengan jadwal pembinaan dan pengawasan dari Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan (HATIBINWASDA) dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid yang merupakan temuan, menjadi bahan bagi Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere (sebagai koordinator pengawasan) untuk menindaklanjuti dan menuangkan dalam sebuah Laporan Hasil Pengawasan Bidang dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere serta tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang cq. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang (Koordinator HATIBINWASDA) sebagai bahan evaluasi, dan juga hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Masing-masing kepada Panitera dan Sekretaris selaku penanggungjawab masing-masing bagian. Untuk segera menindaklanjuti dan membenahi segala hal yang menjadi temuan dan menuangkannya dalam bentuk laporan Tindaklanjuti Hasil Pengawasan Bidang, baik hal-hal yang menyangkut kepaniteraan maupun yang berkenaan dengan kesekretariatan.

Ada dua bidang evaluasi yang terkait yaitu :

- g. Bidang Kepaniteraan (Administrasi Perkara)
  - a. Evaluasi bidang Kepaniteraan yaitu dengan mengadakan rapat rutin dengan para Hakim, dengan Panitera Pengganti, serta rapat dengan Jurusita;
  - b. Mengadakan Rapat, Sosialisasi dan DDTK kepada Tim SIPP, Petugas PTSP dan *E-Court*;
  - c. Mengadakan rapat minimal 1 bulan sekali dengan seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Maumere;
  - d. Pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
- h. Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum)

- a. Evaluasi bidang Kesekretariatan yaitu dengan mengadakan rapat-rapat dengan para Kasubag, petugas operator SIMAK BMN dan Operator SAKPA, Tim Teknologi Informasi, dan Pengelola Website;
- b. Mengadakan rapat minimal 1 bulan sekali dengan seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere;
- c. Pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Pengadilan Agama Maumere telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Maumere perihal diterbitkannya implementasi dari terbitnya Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yang dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa kewajiban Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan dengan memberikan arahan dan pembinaan agar seluruh aparatur dalam tempat kerjanya tersebut tetap memiliki integritas disiplin kerja, mengindahkan kode etik baik hakim/PNS dan mempedomani perilaku yang baik, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.
2. Peningkatan kedisiplinan aparatur Pengadilan Agama Maumere baik dalam hal disiplin Absensi jam masuk, Istirahat dan Pulang maupun disiplin pelaksanaan hasil kinerja;
3. Mengadakan assessmen internal sebagai upaya perbaikan terus-menerus terhadap terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dan tertibnya implementasi administrasi baik di bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan.
4. Mengadakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Hakim Pengawas bidang yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif tentang tugas pokok

dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
- c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere untuk dievaluasi;
- d. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan Hakim Pengawas Bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada Panitera dan Sekretaris agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam jajarannya dengan skala prioritas.

**BAB VII****PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan tugas pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere telah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada, walaupun secara realitas masih sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi baik dalam memenuhi pelayanan secara internal maupun pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan;
2. Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Zona Integritas diharapkan dapat mewujudkan Pengadilan Agama Maumere menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM), sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, dan juga dengan harapan Pengadilan Agama Maumere mendapatkan kenaikan kelas dari Kelas II menjadi kelas 1 B.
3. Penyelesaian perkara Tahun 2022 pada tingkat pertama telah diusahakan secara maksimal. Dengan penerimaan perkara pada tahun 2022 sebanyak 144 perkara dan telah berhasil diselesaikan sebanyak 140 perkara sehingga sisa perkara tahun 2022 sebanyak 4 perkara. Secara kuantitas terdapat kenaikan jumlah perkara yang ditangani pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 144 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebanyak 97, artinya mengalami pertumbuhan 48 % dan beban kerja yang berhasil diselesaikan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan;
4. Dengan Implementasinya E-Letigasi Mahkamah Agung dan 13 (tiga belas) aplikasi Inovasi Badan Peradilan Agama, sangat memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Maumere, khususnya dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, karena baik lembaga hukum maupun masyarakat sangat merasa terbantu dengan

hadirnya pembaharuan peradilan yang berbasis teknologi informasi sesuai dengan asas beracara di Pengadilan yaitu Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

5. Pagu Anggaran belanja Kantor Pengadilan Agama Maumere (402851) Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2022 setelah mengalami revisi-7 kali sebesar Rp. 2.805.015.000 (*Dua Miliar delapan ratus lima juta lima belas Ribu Rupiah*) sedangkan anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 2.690.632.037 (*Dua miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah*) atau sebesar 95,92%. Terdapat sisa anggaran pada belanja pegawai sebesar Rp. 102.329.953 (*Seratus dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah*), belanja barang sebesar Rp. 12.053.010 (*Dua belas juta lima puluh tiga ribu sepuluh rupiah*) sedangkan pada anggaran belanja modal dapat terserap 100%.
6. Pagu Anggaran belanja kantor Pengadilan Agama Maumere (402852) Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2022 sebesar Rp. 61.952.000,- (*Enam puluh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.907.000,- (*Enam puluh juta Sembilan ratus tujuh ribu rupiah*) atau sebesar 99,93 % dan terdapat sisa anggaran Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
7. Dengan adanya alokasi anggaran Prodeo, Sidang Keliling dan Posbakum sangat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, karena masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan hukum dan pelayanan perkara dengan secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat. Khususnya masyarakat yang berada dikepulauan dan daerah terpencil seperti Desa Parumaan telah dilakukan sidang keliling 2 kali, Pulau Besar 1 (kali) dan Sidang Keliling di Kelurahan Wuring (Nangahure) di tahun 2022 oleh Pengadilan Agama Maumere dalam sidang itsbat nikah.
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas Peradilan selain dukungan sarana dan prasarana yang telah dijabarkan diatas, juga sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur pegawai Pengadilan Agama Maumere maupun pelaksanaan pelayanan

bagi masyarakat pencari keadilan karena dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Agama Maumere saat ini berdampak kepada adanya Pegawai yang merangkap Jabatan/pekerjaan pada bidang Kesekretariatan maupun pada bidang Kepaniteraan, hal ini tidak lain untuk memenuhi optimalisasi fungsi peradilan agar berjalan dengan baik dan lancar terlebih pada peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan;

9. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yudisial maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif karena adanya respon timbal balik sebagai wujud tindaklanjut dari hasil pengawasan bidang;
10. Pelaksanaan implementasi Teknologi Informasi dan transparansi peradilan sudah berjalan dengan baik dengan didukung website Pengadilan Agama Maumere yaitu *pa.maumere.go.id* yang selalu terupdate, aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan menggunakan versi terbaru 5.1.0, Komdanas, Kinsatker, APS Badilag, Sikep MARI, dan Aplikasi Backup Sikep (ABS), Direktori Putusan serta sistem Informasi Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah terintegrasi dengan Website Pengadilan Agama Maumere. Aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama Maumere, juga terhubung dengan monitor pada ruang tunggu sidang pada Pengadilan Agama Maumere yang memudahkan masyarakat melihat jadwal sidang di Pengadilan Agama Maumere serta Aplikasi Keuangan (SAKTI) yang telah disosialisasikan oleh Kementerian Keuangan dan akan dioptimalisasikan di Tahun 2022.

## **B. Rekomendasi**

- i. Agar Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Agama dapat lebih meningkatkan optimalisasi fungsi aplikasi yang telah di launching untuk digunakan pada satuan kerja tingkat pertama sehingga pelayanan masyarakat pencari keadilan dapat dilakukan secara optimal.
- ii. Agar Mahkamah Agung RI lebih mencanangkan peningkatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk Pejabat Struktural dan Fungsional untuk lebih

meningkatkan pengalaman dan kompetensi SDM aparatur khususnya kualitas SDM berbasis teknologi informasi.

- iii. Dalam Hal Sumber Daya Manusia hendaknya Mahkamah Agung RI dapat menambah /memindahkan pegawai yang berada disatuan kerja yang jumlah aparaturnya lebih banyak sehingga Pengadilan Agama Maumere mendapatkan tenaga Pegawai baru untuk mengisi kekosongan jabatan maupun aparatur saat ini.
- iv. Agar Mahkamah Agung RI dapat menambah alokasi anggaran baik dalam sarana dan prasarana maupun belanja modal di Pengadilan Agama Maumere khususnya sebagai pendukung meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE  
NOMOR : W23-A9/498 /OT.01.1/SK/12/2022**

**TENTANG**

**REVISI PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PADA PENGADILAN AGAMA MAUMERE  
TAHUN 2022**

**KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Tahunan di Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022 yang efektif dan efisien Maka, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan di Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022;
2. Bahwa Susunan Tim Penyusun Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022 perlu mengalami perubahan sehubungan dengan adanya mutasi pada Aparatur Pengadilan Agama Maumere;
3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RB. Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE TENTANG REVISI PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN PADA PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2021;**
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor : W23-A9/ 122 /KP.00.3/SK/12/2021 tanggal 01 Desember 2021;
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I Susunan Tim Penyusun Laporan Tahunan pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022;
- KETIGA** : Menetapkan Struktur Tim sebagaimana tercantum Lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Uraian Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun Laporan Tahunan pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022 sebagaimana tercantum lampiran III Surat Keputusan ini;
- KELIMA** : Agar pegawai yang ditunjuk dan diangkat dalam Tim Penyusun Laporan Tahunan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Maumere  
Pada Tanggal : 14 Desember 2022

**Sri Rahmah Bao, S.Ag.,M.H.**  
**NIP. 197403012006042001**

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere

Nomor : W23-A9/ 498 /OT.01.1/SK/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Susunan Tim Penyusun Laporan Tahunan  
Pada Pengadilan Agama Maumere  
Tahun 2022

- A. Pengarah : **Suratnah Bao, S.Ag., M.H.**  
(Ketua Pengadilan Agama Maumere)
- B. Ketua Tim Penyusun/Reviu : **Jufri Endo, S.H.I**
- C. Sekretaris Tim : **Muhammad Rizki, S.H**
- D. Koordinator Korektor : 1. **Achmad Iftauddin, S.Ag**  
Anggota : 2. Ahmad Muliadi, S.Sy
- E. Kordinator Penyajian data Kepaniteraan : 1. **Mustajib, S.H.I**  
2. Abdullah, S.H., M.H.  
Anggota : 3. Sigit Apriluberta, S.H  
: 4. Hamzah Usman  
: 5. Imam Prabowo, S.H.  
: 6. Ika Asti Hana, S.E.
- F. Kordinator Penyajian data Kesekretariatan : 1. Achmad Hanif, S.Kom.  
Anggota : 2. Hamzah Usman  
: 3. M. Atsil Husnirafi, S.Kom  
: 4. Muhammad Ikram Muslimin, S.E  
: 6. Saudah Yahya, S.H.I
- G. Operator Penyusun : 1. M. Rizki, S.H..  
: 2. M. Ikram Muslimin, S.E  
: 3. Moh Al Amin.

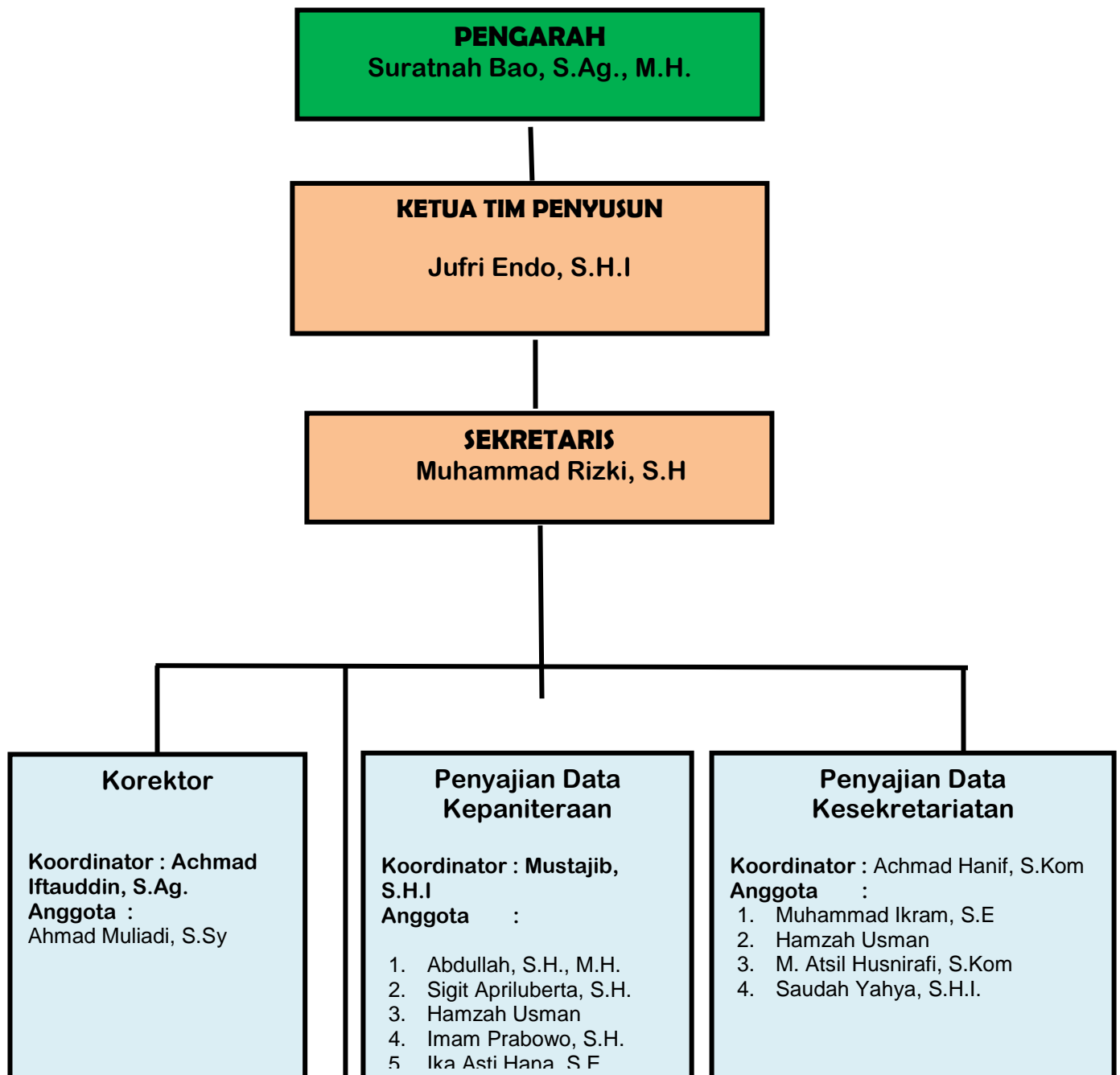


Ditetapkan di : Maumere  
Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Suwinah Bao, S.Ag.,M.H.  
NIP. 197403012006042001

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere  
Nomor : W23-A9/ 497/OT.011/SK/12/2022  
Tanggal : 14 Desember 2022

Struktur Tim Penyusun Laporan Tahunan  
Pada Pengadilan Agama Maumere  
Tahun 2022



**Operator Penyusun**

Koordinator : M. Rizki, S.H.

Anggota : M. Ikram Muslimin, S.E

Anggota : Moh. Al Amin

Ditetapkan di : Maumere

Pada Tanggal : 14 Desember 2022



Sprahman Bao, S.Ag.,M.H.  
NP 197403012006042001

Lampiran III : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere  
Nomor : W23-A9/497/OT.01.1/SK/1/2022  
Tanggal : 03 Januari 2022

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun Laporan Tahunan  
Pada Pengadilan Agama Maumere  
Tahun 2022

**A. Pengarah Bertugas :**

- Menjamin terlaksananya kegiatan Penyusunan dokumen Laporan Tahunan;
- Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan dokumen Laporan Tahunan;
- Meminta pertanggungjawaban ketua tim Penyusunan dokumen Laporan Tahunan;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan dokumen Laporan Tahunan;

**B. Ketua Tim Penyusun Bertugas :**

- Bertanggung jawab terhadap Penyusunan Laporan Tahunan;
- Memimpin pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan;
- Membuat jadwal pelaksanaan Penyusunan Laporan Tahunan;
- Mengkoordinir pembangunan tugas seluruh Tim Penyusunan dokumen Laporan Tahunan;
- Memimpin Rapat evaluasi Tim Penyusunan Laporan Tahunan;
- Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Tahunan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere.

**C. Sekretaris Bertugas :**

- Membantu Ketua Tim dalam menyusun jadwal pelaksanaan Penyusunan Laporan Tahunan;
- Mempersiapkan seluruh administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan Penyusunan Laporan Tahunan;
- Mempersiapkan Outline Laporan Tahunan sesuai pedoman Mahkamah Agung dan membagikan kepada seluruh Tim Penyusun Laporan Tahunan;
- Menjilid hasil laporan tahunan yang telah ditandatangani.
- Mengirim Laporan Tahunan yang telah selesai dijilid ke Pengadilan Tinggi Agama NTT.

**D. Korektor Bertugas :**

- Membantu Ketua Tim dalam Mengoreksi Laporan Tahunan yang telah disusun;

**E. Koordinator Penyajian Data Bertugas :**

- Mengkoordinir anggota dalam pengumpulan data-data dukung dalam penyusunan Laporan Tahunan sesuai tupoksi masing-masing pejabat;

**F. Anggota Bertugas :**

- Membantu Koordinator dalam menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Tahunan;
- Memastikan kevalidan data yang diberikan telah sesuai tupoksi untuk penyusunan Laporan Tahunan;

**G. Operator Penyusun Bertugas :**

- Membantu Ketua Tim dan Sekretaris dalam Pengetikan dan Penyusunan Laporan Tahunan; sesuai outline penyusunan dokumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI atau Pengadilan Tinggi Agama NTT;

**Pengawasan dan Pembinaan PTA Kupang 2022**



**pendampingan ZI PTA kupang**



**PA Maumere Goes To School**



**PA Maumere Dalam Kejuaraan KPTA IV CUP Tahun 2022**



**PA Maumere Hadiri Rakerda PTA Kupang**



**Pelatihan Mitigasi Bencana dan Penggunaan APAR PA Maumere bersama Bersama Basarnas Kabupaten Sikka**



PA Maumere dan PN Maumere Gelar Upacara Bersama Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke 77 Tahun 2022



Upacara Hari Pahlawan Tahun 2022

